



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1116, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. RENSTRA Tahun 2015-2019. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2015-2019, perlu mengganti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.

Pasal 3

Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kerangka regulasi dan kerangka pendanaan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI TAHUN 2015-2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan tinggi tersebut adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi yang telah dicapai pada periode 2010-2014 merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian pada periode 2015-2019.

#### 1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014

##### 1.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Iptek 2010-2014

Program Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada periode 2010-2014 adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Dalam hal ini, pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINas, yaitu kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, disamping *core business* Iptek itu sendiri, yakni relevansi dan produktivitas Iptek serta pendayagunaan Iptek.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Kementerian Negara menetapkan bahwa tugas pokok Kemenristek adalah penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dengan fungsi: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi.

Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, Kemenristek telah menetapkan kebijakan di bidang riset dan teknologi, khususnya berkaitan dengan penguatan SINas yang berupa peraturan dan keputusan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha; Peraturan Menteri Negara Riset dan

Teknologi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi. Adapun Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 241a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekrayasa Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243/M/Kp/XI/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 tentang Arah Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang Pembentukan Program Insentif Riset SINas Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 21/M/Kp/V/2014 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 30/M/Kp/III/2013 tentang Pembentukan Program Technopreneurship Pemuda, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 175/M/Kp/IV/2013 tentang Program Inkubasi Bisnis Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Selain itu, PMK Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten telah berhasil dikeluarkan atas upaya dorongan yang sangat kuat dari Kemenristek. Sementara itu, terdapat kebijakan-kebijakan lainnya yang diperlukan dalam rangka penguatan SINas yang masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah kebijakan pengembangan pusat unggulan Iptek, kebijakan *masterplan* pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, kebijakan pengembangan *Science and Technology Park* (STP), kebijakan mobilisasi peneliti dan perekayasa di lembaga litbang (lemlitbang) pemerintah ke industri, kebijakan *pre-commercial government procurement* untuk penelitian dan pengembangan.

Selain itu, Kemenristek juga memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kemenristek, diantaranya, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenristek, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Di samping itu, pada tahun 2010-2014 terdapat 2 (dua) *Memorandum of Understanding* (MoU) Luar Negeri di bidang Iptek yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2014 tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Scientific and Technological Cooperation*) dan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between*

*the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation).*

Selanjutnya, dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi, beberapa capaian penting tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU Kemenristek secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Sampai 2014	Realisasi Sampai 2014	Capaian
1.	Menguatnya Kelembagaan Iptek	Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian	Peringkat 45	Peringkat 41	Naik 4 Peringkat
2.	Menguatnya Sumberdaya Iptek	Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)	500	551	Tercapai 110%
		Prosentase investasi litbang terhadap PDB	1.00%	0,09%	Tercapai 9%
3.	Menguatnya Jaringan Iptek	Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri	20	25	Tercapai 125%
4.	Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek	Jumlah Paten Terdaftar	3.800	6.868	Tercapai 180,74%
		Jumlah Publikasi Ilmiah	90	394	Tercapai 437,78%
5.	Meningkatnya Pendayagunaan Iptek	Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk <i>national</i>	158	182	Tercapai 115,19%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Sampai 2014	Realisasi Sampai 2014	Capaian
		<i>security</i>			

Pada pilar Kelembagaan Iptek, peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia menurut laporan GCI-WEF (*Global Competitiveness Index-World Economic Forum*) tahun 2014 berada pada nomor 41. Capaian peringkat ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu nomor 45 (empat puluh lima). Tercapainya target IKU ini didapatkan karena dukungan sumber daya baik berupa dukungan anggaran yang memadai, SDM yang kompeten, dukungan kebijakan dari pimpinan, maupun efektivitas instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenristek dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan Iptek.

Instrumen kebijakan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan IKU ini adalah program Pusat Unggulan Iptek (PUI). Melalui instrumen kebijakan ini, Kemenristek dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mendorong tumbuh kembangnya PUI di seluruh Indonesia. Dengan memberikan insentif pembinaan kepada pusat-pusat litbang berpotensi dan berkinerja baik, sampai saat ini telah ditetapkan 9 (sembilan) pusat litbang menjadi PUI (Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember; Lembaga Penyakit Tropis (*Institute of Tropical Disease*) Universitas Airlangga; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kopi); Pusat Studi Biofarmaka-IPB; Pusat Kajian Hortikultura Tropika-IPB; Pusat Penelitian Karet; Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung; Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia; dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi).

Pelaksanaan program PUI ini tidak hanya meningkatkan kinerja dari pusat litbang itu sendiri, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan pengakuan dari pihak industri kepada pusat litbang. Setelah ditetapkan menjadi PUI banyak tawaran kerjasama riset yang datang dari industri bahkan dari lembaga internasional dan negara sahabat.

Pada pilar Sumber Daya Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk IKU Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) telah

dicapai sebesar 110%, (seratus sepuluh persen), yaitu 551 (lima ratus lima puluh satu) peneliti dan perekayasa dari yang ditargetkan 500 (lima ratus) peneliti dan perekayasa. Sedangkan, untuk IKU Prosentase investasi litbang terhadap PDB dicapai sebesar 9% (sembilan persen), yaitu 0.09% (nol koma nol sembilan persen) dari yang ditargetkan 1% (satu persen).

Lemahnya investasi litbang dipicu dari kebijakan perpajakan yang belum kondusif terhadap inovasi. Pengaturan insentif perpajakan dan kepabeanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tidak bersifat mandiri, tetapi sangat tergantung pada regulasi perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, sebagian pengaturan mengenai insentif perpajakan dan kepabeanan yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 sebenarnya telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan. Beberapa regulasi tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan.

Akan tetapi, insentif perpajakan dan kepastian tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh pihak industri karena dianggap tidak menarik oleh industri. Undang-Undang 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap penguatan investasi litbang. Di samping itu, Budaya Inovasi juga belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat. Belanja litbang per PDB Indonesia tersebut diatas masih di bawah 1% (satu persen) jauh di bawah rata-rata *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang sudah di atas 2% (dua persen). Disamping itu, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik pada umumnya, investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia terutama pihak swasta atau industri besar untuk kegiatan *Research and Development* (R&D) masih lebih rendah.

Untuk Penguatan Jaringan Iptek sampai dengan tahun 2014 (2010-2014), telah dicapai sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen), yaitu 25 (dua puluh lima) kolaborasi dari yang ditargetkan 20 (dua puluh) Kolaborasi Riset. Bentuk kolaborasi riset adalah berupa konsorsium riset. Kemenristek sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berperan aktif dalam membentuk konsorsium. Pembangunan konsorsium riset antara Perguruan Tinggi dan lembaga litbang dengan litbang perusahaan/industri, merupakan sebuah langkah lanjutan atau bentuk lain dari langkah nyata memadukan kegiatan riset yang ada di Perguruan Tinggi dan lembaga litbang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Keberadaan konsorsium akan menunjang pembentukan sinergi antara Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Industri.

Dalam rangka memperkuat jaringan Iptek, Kemenristek juga berupaya untuk mewujudkan Kawasan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) tumbuh menjadi Indonesia *Science and Technology Park*. Untuk itu, telah dilakukan pembangunan, renovasi dan perawatan gedung laboratorium di Puspiptek.

Pada pilar relevansi dan produktivitas Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk indikator kinerja utama Jumlah Publikasi Ilmiah telah dicapai sebesar 437,78% (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen), yaitu 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Publikasi Ilmiah dari yang ditargetkan 90 (sembilan puluh) Publikasi Ilmiah. Untuk indikator



kinerja utama Jumlah Paten Terdaftar telah dicapai sebesar 180,74% (seratus delapan puluh koma tujuh puluh empat persen), yaitu 6.868 (enam ribu delapan ratus enam puluh delapan) Paten Terdaftar dari yang ditargetkan 3.800 (tiga ribu delapan ratus) Paten terdaftar.

Sementara itu, dalam rangka mendorong Pendayagunaan Iptek sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk IKU Jumlah Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang di Industri, Masyarakat, dan untuk *National Security* telah dicapai sebesar 115,19% (seratus lima belas koma sembilan belas persen), yaitu 182 (seratus delapan puluh dua) dari yang ditargetkan 158 (seratus lima puluh delapan).

#### 1.1.1.2 Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 2010-2014

Hasil pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) periode tahun 2009-2014 berupa program dan kegiatan telah menghasilkan capaian-capaian yang membentuk kondisi umum pendidikan tinggi pada akhir tahun 2014 sebagai berikut:

##### 1.1.1.2.1 Pengaturan Pendidikan Tinggi 2009 - 2014

Selama periode tahun 2009 - 2014 telah banyak dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Diantara peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada periode tahun 2009-2014, yang paling mendasar adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga telah diterbitkan beberapa undang-undang lain yang lebih spesifik, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; dan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

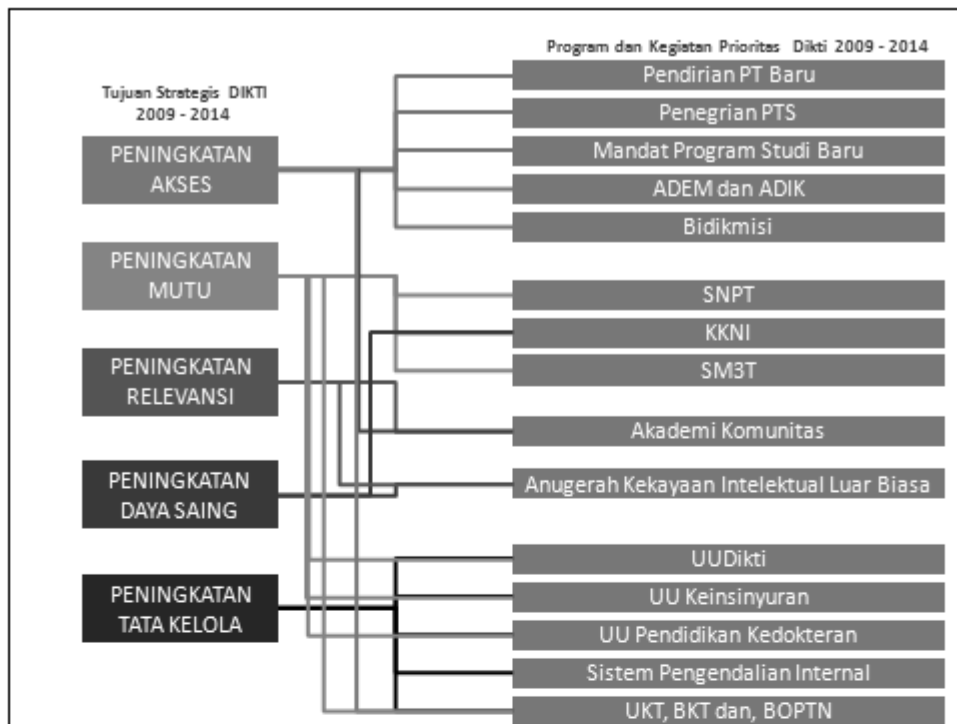
Selanjutnya dari Undang-Undang tersebut di atas telah diterbitkan peraturan turunannya, baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lainnya. Beberapa Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan selama tahun 2009-2014 adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
- Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN Badan Hukum.

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tetapi masih ada beberapa peraturan perundang-undangan penting yang masih belum terselesaikan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain. Peraturan perundang-undangan yang belum selesai harus dapat diselesaikan pada periode tahun 2015-2019.

#### 1.1.1.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2009-2014

Selama tahun 2009-2014 telah banyak dilakukan program dan kegiatan prioritas untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis Dikti. Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilakukan untuk mencapai Tujuan Strategis ditunjukkan oleh Gambar 1.1. Misalkan untuk mencapai Tujuan Strategis Peningkatan Akses telah dilakukan Program dan Kegiatan: Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Penegerian Perguruan Tinggi Swasta, Pemberian Mandat Program Studi Baru, Beasiswa ADik, Beasiswa Bidikmisi, Pendirian Akademi Komunitas, dan Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal serta Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan Strategis yang lain dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Program dan Kegiatan Prioritas Dikti tahun 2009-2014.

Program dan Kegiatan Prioritas Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014 telah membantu mempercepat pencapaian target-target Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014. Program dan Kegiatan yang sudah bagus dan masih relevan dengan kondisi tahun 2015-2019 harus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi.

#### 1.1.1.2.3 Pencapaian Target Pendidikan Tinggi 2010-2014

Target-target Pendidikan Tinggi 2010-2014 ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Target-target yang tercapai diantaranya adalah APK, jumlah dosen bersertifikat, jumlah dosen dengan publikasi nasional, jumlah dosen dengan publikasi internasional, dan jumlah kekayaan intelektual yang dihasilkan seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Pencapaian Target Kinerja Dikti Tahun 2010-2014

No.	Indikator Kinerja Utama	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn	22,80%	24,67%	25,10%	27,01 %	26,75%	30,20%	29,10%	29,87%	30,00%	29,15%
2.	Rasio Kesetaraan Gender PT	111,80%	107,6%	107,90%	103,54%	104,60%	106,80%	103,20%	109,60%	103,00%	112,20%
3.	Jumlah PTN PK BLU/BLU (PTN BH)	20	20	27	21	35	33	35	33	40	33
4.	Jumlah PT Beropini WTP Dari KAP	11	6	20	18	22	18	26	23	30	0
5.	Persentase Prodi Terakreditasi	56,76%	72%	62,73%	59,93%	69,00%	68,74%	100%	88,00%	100%	90,00%
6.	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	49,63%	58,6%	50,00%	56,15%	51,00%	52,67%	57,03%	49,30%	58,00%	52,00%
7.	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia	3	4	5	3	6	3	8	2	11	2
8.	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S1	19%	18,70%	21%	18,11%	24%	17,40%	27%	16,60%	30%	16,50%
9.	APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	4,10%	5,74%	5,00%	8,06%	7,00%	7,30%	9%	7%	10%	6,60%

No.	Indikator Kinerja Utama	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10.	Persentase Dosen Berkualitas Minimal S2	59,50%	62%	61,50%	67,4%	63,30%	63,30%	65,50%	60,67%	70,00%	61,82%
11.	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,80%	9,50%	13,50%	13,5%	10,30%	10,30%	12,50%	11,8%	15,00%	12,66%
12.	Persentase Dosen Bersertifikat	23,00%	21,9%	36,00%	34,5%	50,00%	43,20%	62,50%	72,28%	75,00%	47,43%
13.	Jumlah Dosen dengan Publikasi Nasional	5%	17,2%	5,2%	5,5%	5,40%	6,38%	5,50%	10,50%	5,70%	12,50%
14.	Jumlah Dosen dengan Publikasi Internasional	0,40%	0,75%	0,50%	0,75%	0,60%	0,63%	0,70%	2,10%	0,80%	2,35%
15.	Jumlah kekayaan intelektual yang Dihasilkan	75	76	95	134	110	212	130	152	150	152
16.	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan	9,40%	7,3%	13%	11,46%	15%	10,25%	18%	11,30%	20%	12,50%

Sementara itu, target-target kinerja yang tidak tercapai diantaranya adalah prosentase Prodi terakreditasi minimal B, jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 (lima ratus) dunia, dan prosentase dosen berkualifikasi S3. Secara umum, target-target yang terkait dengan akses bisa dicapai dengan baik tetapi target-target yang terkait dengan mutu dan daya saing belum bisa dipenuhi dengan baik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pada Renstra periode 2015–2019.

1.1.2 Aspirasi Masyarakat Terhadap Iptek dan Pendidikan Tinggi

1.1.2.1 Aspirasi Masyarakat Terhadap Iptek

Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lelitbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapakan peran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata.

Presiden dan Wakil Presiden mengharapakan agar Kemenristekdikti dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja dengan basis teknologi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Kemenristekdikti untuk dapat menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Di samping itu, Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berfokus agar Kemenristekdikti dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian teknis terkait meminta Kemenristekdikti dapat menyediakan teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan.

Lelitbang mengharapakan agar Kemenristekdikti dapat menyediakan pendanaan dan Sarpras Iptek yang memadai dan mendorong pemanfaatan hasil litbang. Dan industri meminta Kemenristekdikti untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk),

Tambahan pula, masyarakat mengharapakan Kemenristekdikti untuk menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).

Dari aspek regulasi, masyarakat Iptek mengharapakan Kemenristekdikti untuk mengeluarkan atau mendorong terbitnya regulasi berkaitan dengan pengaturan lelitbang menjadi pusat unggulan, penganggaran *multiyear*, dan pemyederhanaan administrasi keuangan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, *block grant* dalam kegiatan litbang, *double tax deduction* bagi perusahaan yang mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan litbang, pengembangan SDM Iptek, alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mobilisasi personil lelitbang ke industri, dan komersialisasi hasil litbang. Sementara itu, instrumen kebijakan yang diharapkan dikeluarkan oleh Kemenristekdikti adalah penguatan kelembagaan, program beasiswa yang terintegrasi, penguatan kekayaan intelektual, penguatan jaringan antara lelitbang dan industri, program penguatan kegiatan litbang, dan pendayagunaan Iptek.

1.1.1.2.2 Ekspektasi Masyarakat Terhadap Perguruan Tinggi

Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2. Pada saat Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai *agent of education*, masyarakat berharap Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai *agent of education*, tetapi juga memerankan diri sebagai *agent of research and development*. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini yang berharap Perguruan Tinggi dapat memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge and technology transfer* dan akhirnya sebagai *agent of economic*



1.2.2 Permasalahan

Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) adalah menantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari sisi daya saing, Indonesia saat ini menempati posisi ke-34 dalam *Global Competitiveness Report* (GCR) tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada di posisi ke-44 dan sempat memburuk di tahun 2012-2013 dimana Indonesia berada pada peringkat 50. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31).

Menurut *World Economic Forum* (WEF), pilar pembentuk daya saing ada 12 (dua belas) buah. Kemennristekdikti berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam upaya mendukung daya saing.

Untuk mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi dan inovasi, ada 2 (dua) *direct core element* yang harus ditingkatkan oleh Kemennristekdikti, yaitu inovasi dan tenaga kerja terampil. Dikti seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.3. 2 (dua) *direct core element* tersebut didukung oleh *indirect core element*, yaitu penelitian dan pengembangan serta didukung juga oleh dua *supporting element*, yaitu lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan kedua indeks tersebut, *direct core element*, *indirect core element*, dan *supporting element* ini harus ada dan saling mendukung satu sama lain.

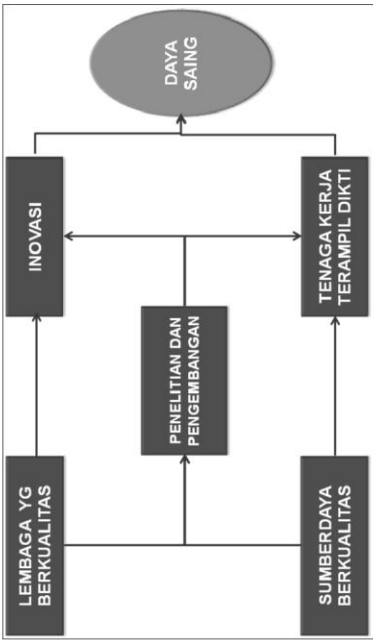
Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% (tiga puluh persen) dari BOPTN harus digunakan untuk biaya penelitian. Dengan adanya BOPTN yang semakin tahun semakin meningkat, kemampuan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam membiayai penelitian menjadi semakin besar. Akibatnya, ke depan penelitian-penelitian inovatif yang memerlukan biaya yang besar yang dulunya tidak mungkin dilakukan ke depan menjadi sangat mungkin.

Pembiayaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah tidak hanya dilakukan lewat APBN tetapi juga lewat dana abadi pendidikan yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dengan akumulasi dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp. 18 (delapan belas) triliun yang digunakan untuk bantuan biaya penelitian, beasiswa, dan penanggulangan bencana, maka potensi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar.

Setelah lama mengusahakan untuk mendapatkan otonomi, akhirnya PTN yang memenuhi persyaratan diberikan otonomi yang luas di bidang keuangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang direvisi, Pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada PTN-BH untuk mengelola keuangannya melalui mekanisme *block grant*. Dengan diberikannya otonomi pada PTN-BH, terutama otonomi di bidang keuangan, PTN-BH bisa menyusun dan melaksanakan kegiatannya secara leluasa dan progresif sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan potensi yang siap dikembangkan pada masa-masa mendatang.

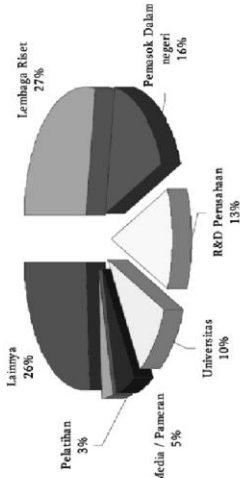
Di samping itu, pengintegrasian fungsi pendidikan tinggi dengan fungsi riset dan teknologi akan dapat membuat kebijakan nasional menyatu untuk mengembangkan penelitian, termasuk penelitian di Perguruan Tinggi, yang utuh dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi industri. Dengan adanya pengintegrasian ini, ke depan potensi Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat/industri akan menjadi semakin besar.





Gambar 1.3 Kerangka Logis yang Diambil Kementristekdikti dalam Mendukung Daya Saing

Dalam 5 (lima) elemen tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan. Elemen pertama adalah lembaga yang berkualitas. Data GCR tahun 2013-2014 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset Iptek berada pada posisi 46 sementara itu Indonesia menempati posisi ke-43 pada tahun 2009-2010 dari 133 negara. Oleh karena itu, kualitas kelembagaan Iptek masih harus ditingkatkan. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa lembaga riset di Indonesia belum menjadi sumber utama bagi teknologi dalam negeri. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya aspek tata kelola administrasi lemlitbang pemerintah masih sangat rumit sehingga akan menghambat efektivitas koordinasi.



Gambar 1.4 Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri

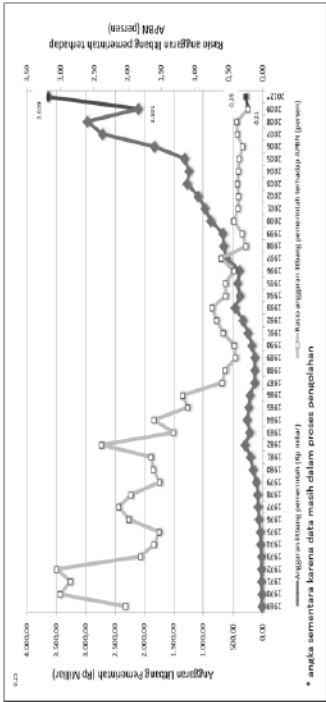
Sumber: Kementristek-BPPT (2011)

Isu yang cukup mendasar dalam konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lemlitbang untuk menjadi pusat unggulan atau *center of excellence*. Selain itu, kelembagaan Iptek lain seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Taman Sains dan Teknologi (TST) sebagai wahana implementasi SIDa, dan Inkubator Teknologi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong menjadi lembaga-lembaga yang unggul (*center of excellence*). Salah satu upaya dalam mendukung perkembangannya Pusat Unggulan adalah dengan mendorong efektivitas pelaksanaan akreditasi dengan penjaminan mutu lembaga litbang yang dilakukan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Karena pelaksanaannya tidak bersifat *mandatory*, belum banyak pranata litbang yang telah terakreditasi KNAPPP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan revitalisasi terhadap kelembagaan KANPPP dan revisi pedoman KNAPPP selama ini untuk dapat digunakan sebagai standar nasional dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu lembaga litbang.

Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah.

Elemen kedua adalah sumber daya yang berkualitas. Bertolak dari fakta yang ada sekarang bahwa berdasarkan data GCR peringkat ketersediaan ilmuwan dan *engineer* masih berada di peringkat 40 dunia pada tahun 2013-2014. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009-2010 yang berada pada peringkat 31. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia dalam menangani masalah SDM Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen, ilmuwan, dan perekayasa masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek investasi litbang, perhatian pemerintah terhadap Iptek dalam tiga dekade terakhir menunjukkan penurunan terus menerus. Indikasi bahwa perhatian pemerintah semakin rendah terlihat pada fakta bahwa sepanjang tahun 1980-2012 terjadi penurunan rasio antara anggaran yang dialokasikan untuk litbang pemerintah terhadap keseluruhan anggaran dalam APBN. Memang secara nominal rupiah terjadi peningkatan namun rasio terhadap keseluruhan APBN terus mengalami penurunan (LIPI, 2012).



Gambar 1.5. Rasio Alokasi Anggaran Litbang Pemerintah  
Sumber: LIPI (2012)

Diantara negara-negara G-20 pun, rasio belanja litbang Indonesia terhadap PDB masih jauh tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menekankan investasi modal dan belum menekankan pada investasi Iptek (*Global R&D Funding Forecast*, 2010). Pemerintah masih merupakan penyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sedangkan sektor swasta masih sangat terbatas perannya, baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia dana. Rasio belanja litbang sektor pemerintah di Indonesia saat ini sebesar 82,3%, (delapan puluh dua koma tiga persen) sementara sektor swasta hanya sebesar 17,7% (tujuh belas koma tujuh persen) (sumber: Survey Litbang Sektor Industri Manufaktur, 2011). Sebagai perbandingan di negara lain, seperti Malaysia, rasio belanja litbang pemerintahnya hanya sebesar 15% (lima belas persen) sedangkan sektor swastanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) (tahun 2006). Thailand memiliki rasio belanja litbang pemerintah sebesar 55% (sembilan puluh lima persen) sedangkan yang bersumber dari swasta sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana, pertama sarana-prasarana litbang yang telah dibangun di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di kawasan Puspiptek Serpong yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi litbang berbagai lembaga di antaranya LIPI, BATAN, BPPT, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang perlu direvitalisasi untuk mendukung relevansi dan produktivitas Iptek. Kedua, untuk meningkatkan akses mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi banyak Perguruan Tinggi yang masih kekurangan gedung belajar, fasilitas, dan peralatan penelitian.

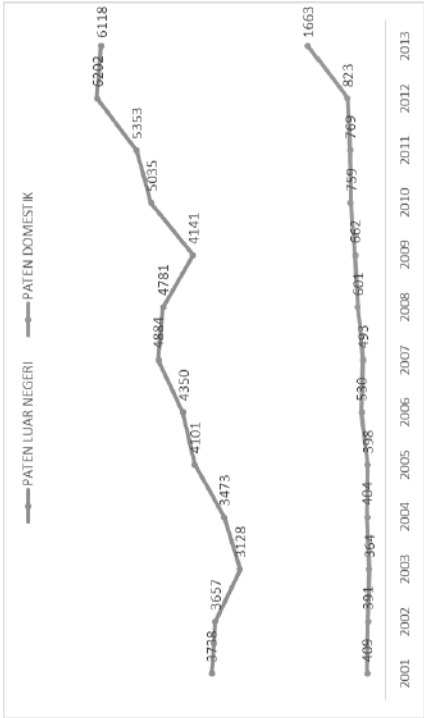
Kemudian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga terampil dari berbagai profesi. Sayangnya pendidikan profesi dan sertifikasi tenaga terampil terlambat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun pendidikan profesi dokter, akuntan, dan pengacara sudah dilaksanakan cukup lama tetapi beberapa pendidikan profesi, seperti profesi insinyur yang sangat dibutuhkan di lapangan kerja sampai sekarang belum dilaksanakan. Keterlambatan yang lebih parah lagi terjadi pada sertifikasi tenaga terampil. Sampai sekarang uji kompetensi dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk profesi dokter dan dimulai tahun 2014. Untuk tenaga profesi yang lain misalkan insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan sampai sekarang.

Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.

Permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada dua permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di

LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik

Sementara itu, elemen ketiga adalah penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan oleh produktivitas Iptek yang dinilai oleh dua indikator yaitu paten dan publikasi ilmiah. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa sekitar 90% (sembilan puluh persen) permohonan paten yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan paten dari luar negeri dan sisanya sekitar 10% (sepuluh persen) merupakan paten domestik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih tergantung dan dikuasai oleh teknologi dari luar dibandingkan dari dalam negeri. Pendaftaran paten domestik Indonesia jika dilihat pada Gambar 1.6 dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 semakin bertambah akan tetapi jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran paten dari luar negeri yang mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar 1.6. Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri  
Sumber: Ditjen Kekayaan Intelektual (2014)

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2011 masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura dan

domestik Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya separuh dari jumlah paten domestik Malaysia. Dalam hal ini Indonesia hanya satu level dengan Filipina.

Tabel 1.3. Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang

No.	Negara	International Patent			Domestic Patent		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1.	Indonesia	7	16	13	684	795	777
2.	Malaysia	224	350	263	1.263	1.275	1.136
3.	Filipina	21	14	21	668	759	822
4.	Singapura	593	641	661	750	895	1.056
5.	Thailand	20	72	67	2.441	2.452	2.161
6.	Vietnam	5	9	18	524	521	493
7.	Jepang	29.802	32.150	3.875	303.114	296.970	293.885

Sumber: WIPO dan Kantor Paten Negara Bersangkutan, 2013.

Ukuran lainnya dari produktivitas Iptek adalah jumlah publikasi (dokumen). Dalam hal ini, menurut *Scientific Journal Ranking (SJR)*, Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan H-index sebesar 112. H-index merupakan indeks komposit dari 5 (lima) indikator: (1) jumlah dokumen (publikasi) dari tahun 1996-2007; (2) jumlah publikasi yang layak dikutip (*citable documents*); (3) jumlah kutipan (*citations*); (4) jumlah kutipan sendiri (*self citation*); dan (5) jumlah kutipan per dokumen (*citations per document*). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara

Peringkat	Negara	Dokumen	Dokumen yang Dapat Dikutip	Jumlah Kutipan	Mengutip Sendiri	Kutipan Per Dokumen	Indeks-H
32	Singapura	149.509	144.653	1.616.952	230.656	12,95	268
40	Malaysia	99.187	97.018	356.918	93.479	7,85	125

43	Thailand	82.209	79.537	621.817	109.600	10.96	167
61	Indonesia	20.166	19.740	146.670	16.149	10.94	112
67	Vietnam	16.474	16.116	125.927	18.500	11,79	107
70	Filipina	13.163	12.796	141.070	15.727	13,38	116

Sumber: Bappenas (2014)

Meskipun Perguruan Tinggi memiliki banyak SDM berkualitas (ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru. Upaya membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena beberapa kendala, yaitu: (i) banyak Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud *mission differentiation*, dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional.

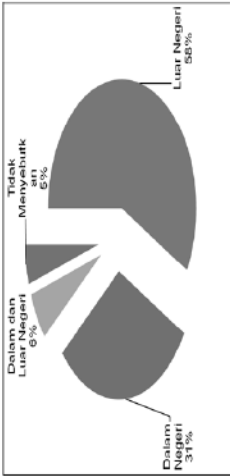
Elemen keempat adalah tenaga terampil pendidikan tinggi. Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing 43,6% (empat puluh tiga koma enam persen) dan 4,4% (empat koma empat persen) (Sumber: Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Selain itu, angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara Perguruan Tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan Perguruan Tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar, yaitu

*white collar jobs* (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka, yaitu 30% (tiga puluh persen) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (*blue-collar jobs*). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di Perguruan Tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.

Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan 3 (tiga) hal, yaitu: (i) *academic skills* yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii) *generic/life skills* yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan (iii) *technical skills* yang berkaitan dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus pada suatu bidang pekerjaan.

Elemen kelima adalah inovasi. Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam negeri di industri masih perlu ditingkatkan. Data hasil survei Kementerian-BPPT (2011) terhadap industri manufaktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6, menyatakan bahwa 58% (lima puluh delapan persen) teknologi di industri diperoleh dari luar negeri dan hanya sekitar 31% (tiga puluh satu persen) yang menyatakan diperoleh dari dalam negeri. Jepang, Cina, Jerman dan Taiwan menjadi negara yang paling besar teknologinya digunakan oleh industri di dalam negeri.



Gambar 1.7. Sumber Teknologi di Industri Manufaktur

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian I bahwa Kemenristekdikti menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

2.1 Visi

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2015-2019 Kemenristekdikti menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

2.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Kemenristekdikti adalah:

- 1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk meningkatkan SDM yang berkualitas

Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besarnya anggaran penelitian sebelum tahun 2015 belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai akibatnya, selama ini penelitian di Perguruan Tinggi kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala laboratorium, kekayaan intelektual, dan publikasi internasional. Bagaimana melakukan hilirisasi penelitian yang telah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di masa datang.

puluh satu); dan indeks reformasi birokrasi Kemenristekdikti ditargetkan mencapai nilai 85 (delapan puluh lima).

2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

2.3 Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristekdikti, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;
2. Meningkatkan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi.

2.4 Sasaran Strategis

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. meningkatkannya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi;
2. meningkatkannya kemampuan iptek dan inovasi; dan
3. terlaksananya reformasi birokrasi.

Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja sasaran strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan mencapai nilai 42,25 (empat puluh dua koma dua puluh lima); indeks inovasi Indonesia pada

Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam periode 2015-2019 adalah antara lain:

- a. Untuk mendukung ketahanan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan sub-optimal seperti lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering;
- b. Di bidang energi, akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) percontohan berskala kecil; dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW) sebagai *pilot plant*.
- c. Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC;
- d. Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat komuter N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototipe untuk uji statik, dan 2 prototipe untuk uji terbang;
- e. Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya *IT Security*; pengembangan system dan *framework/platform* perangkat lunak berbasis *Open Source* khususnya sistem TIK pendukung *e-Government & e-Business*;
- f. Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan; dan
- g. Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon.
- 2. Layanan Perumahan dan Teknologi  
Secara umum, strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu, akan dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.
- 3. Layanan Infrastruktur Mutu  
Layanan Infrastruktur Mutu mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi,

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang mendukung:
  - a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
  - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
  - c. penyediaan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
- 2. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.
- 3. Terbangunnya 100 (seratus) *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek (P3-IPTeK) bagi peningkatan daya saing sektor produksi, diarahkan pada:

- 1. Penyelenggaraan Litbang (Riset)  
Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; (7) material maju.

Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing sektor produksi adalah:

- a. Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (*invention*), melakukan uji *alpha* untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji *beta*, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat; dan
- b. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi.



Standar Nasional Indonesia (SNI) barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

4. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir

Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi meningkatkan pengawasan secara kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir dengan: (1) Memperkuat peran dan kualitas *Regulatory Technical Support Organization* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.

5. Penguatan kerja sama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan *entrepreneur* pemuda lewat pembangunan inkubator dan modal ventura.

Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup:

1) Sumber Daya Hayati (*Bioresources*)

Arah kebijakan Pembangunan Iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (1) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi; dan (2) melaksanakan kewenangan sebagai Otoritas Keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut untuk dapat mencakup seluruh sumber daya hayati Indonesia yang keragaman dan jumlahnya sangat besar. Untuk mendukung eksplorasi biota laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan serta akan dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan

- b) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi *ex-situ* (kebun raya), gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut;
- c) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan *aquaculture-biotech*; dan
- d) Meningkatkan diseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebun-kebun percobaan, perbanyakan bibit, dan pembinaan masyarakat sendiri.

2) Sumberdaya Nirhayati

Arah kebijakan litbang sumberdaya nirhayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pusat penelitian kelautan di Pantai Penajam Kalimantan Timur; pengembangan dan uji coba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana.

3) Penginderaan Jauh

Arah kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah (1) pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit SPOT generasi terbaru; (2) pengembangan dan pembangunan satelit; dan (3) pengembangan roket sipil sebagai pendorong muatan satelit ke luar angkasa.

4) Mitigasi Perubahan Iklim

Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfer.

Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi pembangunan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, arah kebijakannya adalah menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan yang mencakup seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Strateginya adalah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk membentuk 6 (enam)



simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.

Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, pembangunan Iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek menuju STP yang maju dan modern serta pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; (3) Pembangunan *repository* dan diseminasi informasi Iptek; serta (4) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.

Disamping itu, investasi pada umumnya lahir di lembaga litbang dan Perguruan Tinggi, di samping di unit-unit litbang industri dan masyarakat. Produk investasi yang masih berupa prototipe, masih harus melewati serangkaian tahapan hingga bisa diterapkan dalam proses produksi atau diproduksi massal oleh industri. Untuk itulah, diperlukan sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi aliran investasi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif. Di banyak negara maju, lembaga atau wahana tersebut sering disebut dengan *Science and Technology Park* (STP). Namun dengan semakin berjalannya waktu serta disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya yang spesifik di setiap wilayah di Indonesia maka dalam penamaannya ke dalam bahasa Indonesia, lembaga atau wahana ini diulaskan menjadi Taman Sains dan Teknologi (TST). Keberadaan TST ini terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi.

Dalam rangka pengembangan Taman Sains dan Teknologi, arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai:
  - 1) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
  - 2) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan
  - 3) Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
- b. Pengembangan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai:
  - 1) Penyedia pengetahuan terkini oleh dosen Perguruan Tinggi setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;

- 2) Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; dan
  - 3) Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
- c. Pengembangan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:

- 1) Pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, Perguruan Tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan
- 2) Tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park, N-STP*) akan dilaksanakan melalui: (a) revitalisasi kawasan Puspiptek-Serpong; (b) revitalisasi Inkubator Teknologi-BPPT di Puspiptek; (c) revitalisasi Cibinong *Science Centre-LIPI* serta pembangunan pusat inovasi yang ada di dalamnya; (d) pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam Kalimantan Timur; serta N-STP di lingkungan universitas; dan
- 2. Pengembangan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh: (1) Kemenristekdikti bagi taman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun.

Dalam RPJMN tahun 2015-2019, arah kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi ada 5 (lima), yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui strategi :
  - a. Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3;
  - b. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
  - c. Penambahan jumlah dan penguatan *assessor* BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;

- d. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK; dan
  - e. Peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi PT.
2. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi:
- a. Pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  - b. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan Perguruan Tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja;
  - c. Penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia industri untuk litbang;
  - d. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara selektif dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains, keteknikan, dan kedokteran;
  - e. Perlindungan prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan lain-lain; serta
  - f. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri.
3. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui strategi:
- a. Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses Perguruan Tinggi;
  - b. Peningkatan efektivitas *affirmative policy*;
  - c. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
  - d. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan kualitas LPTK melalui strategi:
- a. Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;
  - b. Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota);
  - c. Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*;
  - d. ~~Dasar-dasar sistem indikasi dan monitoring mutu.~~

- e. Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan
  - f. Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui:
- a. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri;
  - b. Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi PTN-BH;
  - c. Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*; dan
  - d. Penganggaran berdasarkan *performance based budgeting* agar Perguruan Tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti
- 3.2.1 Arah Kebijakan Kemenristekdikti
- Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan.
- Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah:
- a. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
  - b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
  - c. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
  - d. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan;
  - e. Meningkatkan inovasi bangsa; dan
  - f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.
- Sedangkan, fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005-2025, yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang-bidang sebagai berikut:

3. Inovasi

Dalam rangka mencapai target-target tridharma perguruan tinggi yang sangat menantang diperlukan inovasi/terobosan di semua aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi harus melakukan inovasi di segala bidang. Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat diproduksi secara komersial dan dimanfaatkan oleh pengguna.

4. World Class University

Sampai tahun 2025 paling sedikit ada 7 (tujuh) perguruan tinggi Indonesia yang masuk 500 (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia versi QS World University Rankings. Kemenristekdikti merencanakan program kerja pada perguruan tinggi dalam hal peningkatan reputasi akademik, reputasi pendidik dan tenaga kependidikan, *faculty/student ratio*, sitasi per *paper*, serta internasionalisasi.

5. De-Regulation

Dalam rangka meningkatkan inovasi, mengimplementasikan program-program untuk mencapai perguruan tinggi berkelas dunia, dan melaksanakan program afirmasi perlu dilakukan deregulasi terhadap aturan-aturan terkait pendidikan tinggi yang menghambat pengembangan perguruan tinggi.

Secara filosofis berdasarkan analisis CATWOE (*Customer, Actor, Transformation Process, World-view, Owner, and Environment Constraints*), revitalisasi peran dan fungsi Kemenristekdikti adalah “merumuskan, menetapkan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian, pengembangan serta penerapan iptek yang dilaksanakan oleh lemitbang, Perguruan Tinggi, dan badan usaha untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dengan berpedoman pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara fokus dan konsisten, melalui pemberdayaan pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan Iptek dan Dikti, sumber daya Iptek dan Dikti, riset dan pengembangan, serta dengan penguatan inovasi guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa Indonesia”.

2. Energi;

- 3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
- 4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi;
- 5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
- 6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
- 7. Material Maju.

Disamping itu fokus di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditambah 3 (tiga) bidang sebagai berikut:

- 1. Maritim;
- 2. Kebencanaan; dan
- 3. Sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan.

3.2.2 Strategi Kebijakan Kemenristekdikti

Rencana pengembangan pendidikan tinggi membawa tema sebagai berikut:

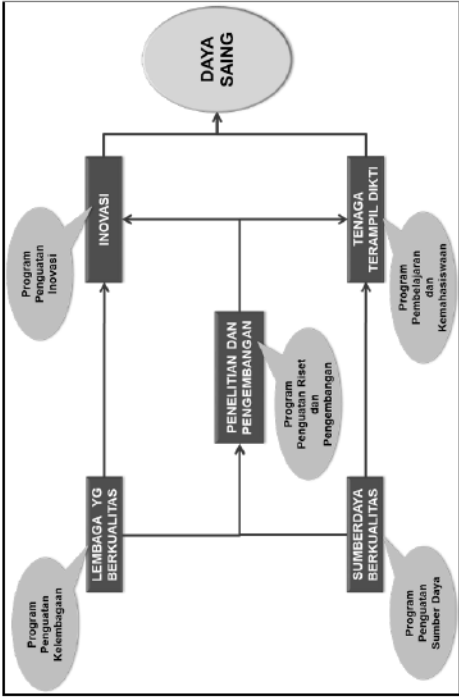
1. Mission Differentiation

Perguruan tinggi memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Ketiadaan fokus pengembangan perguruan tinggi akan menyulitkan institusi untuk menjadi pusat unggulan. Oleh sebab itu, arah pengembangannya institusi pun perlu dibedakan sesuai dengan karakteristiknya. Ada institusi yang diarahkan pada *research university*, *teaching university*, dan penguatan LPTK. Selain itu, perlu adanya penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*.

2. Afirmasi (*Closing the Gap*)

Indonesia mempunyai sekitar 4300 (empat ribu tiga ratus) perguruan tinggi negeri dan swasta. Perbedaan mutu antara perguruan tinggi terbaik dan yang paling lemah sangat lebar. Perbedaan juga terjadi antar wilayah, antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Pemberian afirmasi pada perguruan tinggi yang lemah perlu dilakukan agar mutunya tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi yang mutunya sudah bagus. Kebijakan afirmasi juga diperlukan untuk mengurangi perbedaan mutu antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa.

Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi kebijakan Kemenristekdikti, secara singkat dapat digambarkan dalam kerangka kerja logis Kemenristekdikti sebagaimana tergambar dalam gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Logis dan Program Kemenristekdikti

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi struktural dan fungsional. Pendekatan sinergi fungsional dilakukan untuk menerobos jika terjadi kebuntuan struktural melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan tupoksi untuk meningkatkan *binding energy* di antara pemangku kepentingan dan aktor Pendidikan Tinggi dan Iptek. Dengan sinergi struktural dan fungsional yang baik, maka lulusan-lulusan Perguruan Tinggi akan menjadi lebih berkualitas sehingga bisa melahirkan calon-calon inovator handal.

Selain itu, dengan sinergi struktural dan fungsional juga diharapkan hasil litbang dan penemuan Iptek yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian baik di lembaga riset pemerintah maupun badan usaha dapat diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran” untuk produk inovasi. Proses melintasi “Lautan Kemubaziran” adalah sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan litbang Iptek untuk bisa dikomersialkan atau di dayagunakan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain atau dengan kata lain *hutilisasi* hasil libang secara optimal. Dalam hal ini, Kemenristekdikti menempatkan posisi

Sesuai dengan revitalisasi tugas, fungsi dan kewenangan Kemenristekdikti secara substansial strategi kebijakan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), mahasiswa yang berwirausaha, lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, program studi terakreditasi minimal B, lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja, perguruan tinggi yang menerapkan SNI/IKTI, mahasiswa berprestasi, dan mutu LPTK dalam penyelenggaraan pendidikan akademik;
- b. Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 (lima ratus) top dunia dan Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek dan *Science Technology Park* (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang *mature*;
- c. Meningkatkan jumlah dosen dan SDM Litbang yang berkualifikasi S3, SDM yang meningkat karir dan kompetensinya, dan revitalisasi sarpras PTN dan Litbang;
- d. Meningkatkan jumlah publikasi internasional, KEKAYAAN INTELEKTUAL yang didaftarkan, prototipe hasil R&D, dan prototipe industri;
- e. Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna;
- f. Meningkatkan efisiensi perencanaan penganggaran, opini laporan keuangan BPK, nilai AKIP, Indeks Kepuasan Pelayanan, kasus hukum yang dapat diselesaikan, kesesuaian kompetensi pejabat, serta rasio data dan *knowledge* Iptek Dikti yang dimanfaatkan; dan
- g. Meningkatkan unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan material.

Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis,

- 1 (satu) program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan, yaitu:

- 1. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- 3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 4. Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
- 5. Program Penguatan Inovasi;
- 6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
- 7. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas

- Rancangan Perpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir;
- Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2019;
- Rancangan Perpres tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
- Rancangan Perpres tentang Audit Teknologi;
- Rancangan Perpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi; dan
- Rancangan Perpres tentang Mikroorganisme.

Iptek menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (*value creation*), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat *supply-push* menjadi *demand-driven* dalam bingkai Sistem Inovasi Nasional (SINas).

Selain Perguruan Tinggi yang merupakan entitas di bawah kendali langsung Kemenristekdikti maka Kemenristekdikti juga berupaya memfasilitasi interaksi antar Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha serta interaksi dengan lingkungan eksternal.

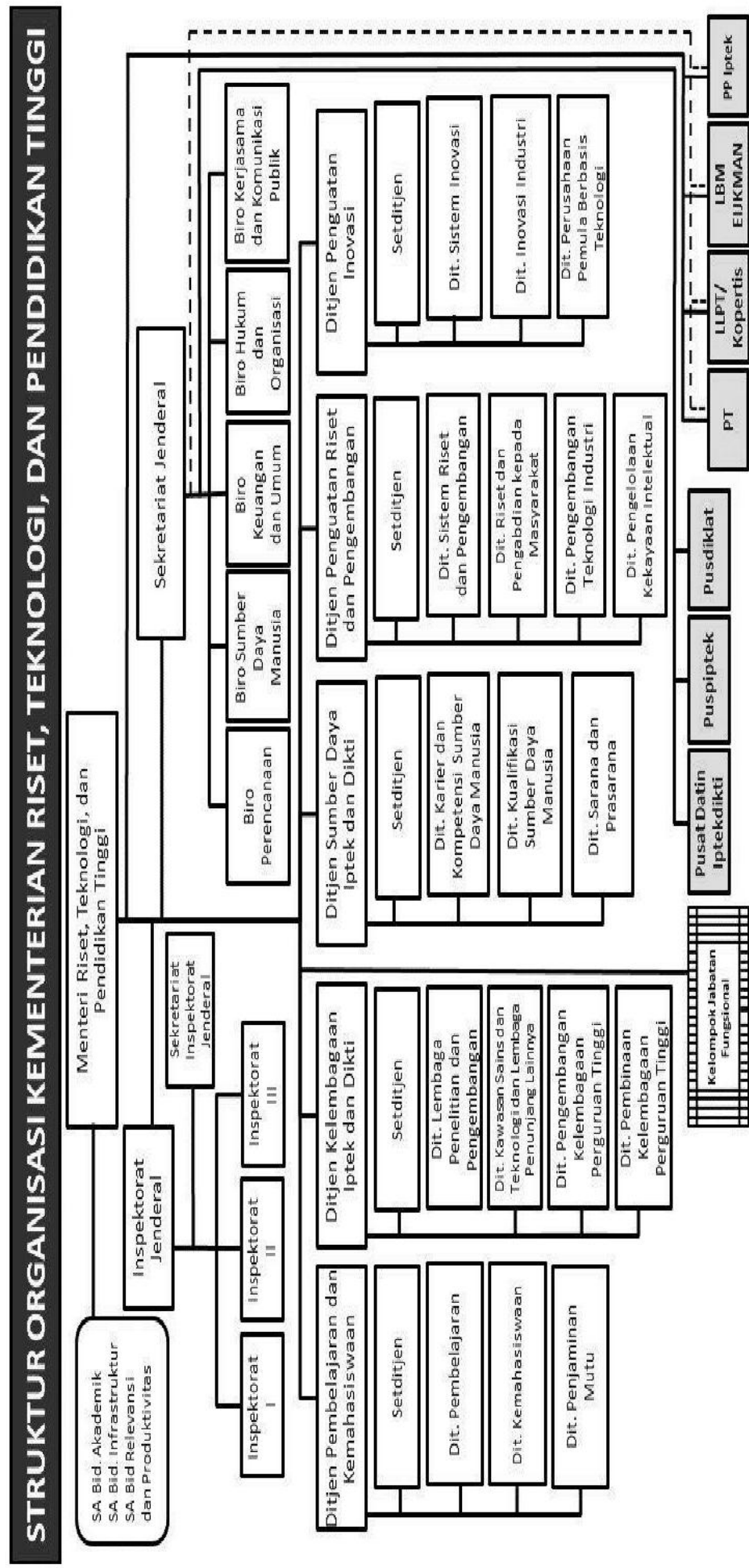
3.3 Kerangka Regulasi

Regulasi untuk pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi sangat diperlukan oleh Kemenristekdikti. Untuk itu, Kemenristekdikti akan merumuskan dan menetapkan regulasi-regulasi sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINAS P3IPTEK).
2. RU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP):
  - RPP tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
  - RPP tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - RPP tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  - RPP tentang Penugasan Dosen;
  - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - RPP tentang Tata Cara Perlindungan dalam Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan; dan
  - RPP tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Pengelolaan Mineral Radioaktif.
4. Rancangan Peraturan Presiden:
  - Rancangan Perpres tentang Dewan Insinyur Indonesia;

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan Kemenristekdikti Tahun 2015-2019



IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut. Secara lebih rinci IKSS Kemenristekdikti dan target yang akan dicapai pada periode 2015-2019, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Revisi Renstra Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				Ket
	2015	2016	2017	2018	2019
SS 1: Meningkatkan Kemampuan Iptek dan Inovasi					
IKS Indeks Inovasi S	-	-	16,85	24,82	32,41
SS 2: Meningkatkan Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi					
IKS Indeks Pendidikan Tinggi S	-	-	26,17	34,12	42,25
SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi					
IKS Indeks Reformasi Birokrasi S	-	-	75	80	85

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program SP (Outcome) 1: Meningkatkan kualitas pembelajaran dan	Target				Ket
	2015	2016	2017	2018	2019

Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program	Target				Ket
	2015	2016	2017	2018	2019
mahasiswa pendidikan tinggi					
I Angka Partisipasi Kasar	26,86	28,16	31,75	32,05	32,55
K (APK) Perguruan Tinggi	%	%	%	%	%
P					
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	55%	60%	63%	66%	70%
Persentase prodi terakreditasi minimal B	-	40%	42%	44%	46%
Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja	50%	60%	65%	70%	75%
Persentase perguruan tinggi yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	-	50%	75%	77,5%	80%
Jumlah mahasiswa berprestasi	-	390	3.500	3.850	4.235
Persentase mahasiswa yang lulus PPG	-	95%	96%	97%	98%
SP (Outcome) 2: Meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti					
I Jumlah Perguruan Tinggi	2	3	3	4	5
K masuk top 500 dunia					
P Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)	29	39	59	80	110
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang <i>mature</i>	6	14	16	19	22
Jumlah Pusat Unggulan Iptek	12	15	30	35	40
SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas					

Sasaran Program (Outcome)/		Target					Ket
Indikator Kinerja Program		2015	2016	2017	2018	2019	
I	Persentase dosen	10,05	11,32	13,09	14,86	16,63	Kumulatif
K	berkualifikasi S3	%	%	%	%	%	
P	Jumlah SDM yang meningkat karirnya	12.901	17.392	19,22	20.36	21.500	
				8	4		Nominal
	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	871	1.347	2.141	2.641	3.061	Nominal
	Jumlah revitalisasi sarpras PTN	108	108	118	118	118	Nominal
	Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3	5,5%	6%	6,2%	6,4%	6,8%	Nominal
SP (Outcome) 4: Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan							
I	Jumlah publikasi internasional	5.008	6.229	12.00	14.00	19.000	Nominal
K				0	0		
P	Jumlah KEKAYAAN INTELEKTUAL yang didaftarkan	1.580	1.735	1.910	2.200	2.400	Kumulatif
	Jumlah prototipe R&D	530	632	783	1.000	1.200	Nominal
	Jumlah prototipe industry	15	15	20	25	30	Nominal
SP (Outcome) 5: Menguatnya kapasitas inovasi							
I	Jumlah produk inovasi	10	15	40	50	60	Nominal
K							
P							
SP (Outcome) 6: Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti							
I	Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpanan yang material	40	50	60	70	80	Kumulatif
K							
P							

Sasaran Program (Outcome)/		Target					Ket
Indikator Kinerja Program		2015	2016	2017	2018	2019	
I	tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti						
K	Hasil Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	-	-	82%	84%	86%	Nominal
P	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nominal
	Penilaian terhadap AKIP	B	B	BB	BB	A	Nominal
	Indeks Kepuasan Pelayanan	60%	65%	Hijau	Hijau	Hijau	Nominal
	Prosentase kasus hukum yang diselesaikan	40%	45%	50%	55%	60%	Nominal
	Tingkat kesesuaian kompetensi Pejabat	-	75%	80%	95%	100%	Nominal
	Rasio data dan <i>knowledge</i> Iptek dan Dikti yang dimanfaatkan	-	100%	100%	100%	100%	Nominal

Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Sasaran Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan		Target				
(Output)/		2015	2016	2017	2018	2019
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan						
SK (Output) 1 : Sistem Informasi SNMPTN dan SBMPTN	-	-	2	2	2	2
IKK 1.1 : Jumlah sistem informasi SNMPTN dan	-	-	2	2	2	2



Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SBMPTN					
SK (Output) 2 : Layanan Pelaksanaan PHLN	-	-	9	9	9
IKK 2.1 : Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	-	9	9	9
SK (Output) 3 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	-	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah layanan perencanaan program dan anggaran	-	-	12	12	12
IKK 3.2 : Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	-	-	12	12	12
IKK 3.3 : Jumlah layanan keuangan dan perbendaharaan	-	-	12	12	12
IKK 3.4 : Jumlah layanan data dan informasi	-	-	12	12	12
IKK 3.5 : Jumlah layanan hukum, humas, kerjasama, dan protokol	-	-	12	12	12
IKK 3.6 : Jumlah layanan kepegawaian	-	-	12	12	12
IKK 3.7 : Jumlah layanan umum, perlengkapan dan rumah tangga	-	-	12	12	12
IKK 3.8 : Jumlah layanan pimpinan Eselon II	-	-	12	12	12
SK (Output) 4 : Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )	-	-	1	1	1
IKK 4.1 : Pengadaan perlengkapan operasional perkantoran	-	-	1	1	1
IKK 4.2 : Pengadaan kendaraan operasional pimpinan dan perkantoran	-	-	1	1	1

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perkantoran					
IKK 5.1 : Pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12
IKK 5.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran					
SK (Output) 1 : Dosen Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Berorientasi KKNI	-	-	10.000	12.500	15.000
IKK 1.1 : Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan	-	-	9.940	12.420	14.900
IKK 1.2 : Jumlah dosen yang menyusun pedoman pembelajaran	-	-	30	40	50
IKK 1.3 : Jumlah dosen yang menyusun bahan ajar	-	-	30	40	50
SK (Output) 2 : Mahasiswa Mengikuti Program Transfer Kredit	-	-	1.500	2.000	2.500
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa mengikuti program transfer kredit	-	-	1.500	2.000	2.500
SK (Output) 3 : Layanan Ijazah Pendidikan Tinggi	-	12	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah layanan penyetaraan ijazah luar negeri	-	12	12	12	12
IKK 3.2 : Jumlah layanan pencegahan ijazah palsu	-	12	12	12	12
SK (Output) 4 : Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	-	175	225	250	300
IKK 4.1 : Jumlah program studi penyelenggara Rekognisi	-	175	225	250	300

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 5 : Perguruan Tinggi Menerapkan SNIKTI	-	46	525	665	810
IKK 5.1 : Jumlah perguruan tinggi yang menerapkan SNIKTI	-	-	300	400	500
IKK 5.2 : Jumlah LPTK yang meningkatkan mutu pembelajaran	-	46	65	75	90
IKK 5.3 : Jumlah perguruan tinggi vokasi yang menerapkan pembelajaran melampaui SNIKTI	-	-	160	190	220
SK (Output) 6 : Pendidik dan Calon Pendidik yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru	-	9.298	20.000	25.000	30.000
IKK 6.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	-	-	120.000	120.000	120.000
IKK 6.2 : Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	-	6.278	17.000	22.000	27.000
IKK 6.3 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi	-	3.020	3.000	3.000	3.000
SK (Output) 7 : Program Studi Mengembangkan <i>Joint Curriculum</i>	-	-	300	400	500
IKK 7.1 : Jumlah program studi yang mengembangkan <i>Joint Curriculum</i>	-	-	300	400	500
SK (Output) 8 : Perguruan Tinggi Menerapkan Pembelajaran Khusus dan Difabel	-	-	150	200	250
IKK 8.1 : Jumlah perguruan	-	-	150	200	250

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
pembelajaran khusus dan difabel					
SK (Output) 9 : Matakuliah yang Diterapkan Program Studi dengan PJJ	-	-	500	700	900
IKK 9.1 : Matakuliah yang diterapkan program studi dengan PJJ	-	-	500	700	900
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir					
SK (Output) 1 : Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369
IKK 1.1 : Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369
SK (Output) 2 : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	-	3.277	5.474	8.541	13.014
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	-	3.277	5.474	8.541	13.014
SK (Output) 3 : Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA	121.000	61.904	120.000	280.000	340.000
IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan PPA	121.000	61.904	120.000	280.000	340.000
SK (Output) 4 : Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	78	220	259	297	338
IKK 4.1 : Jumlah beasiswa peraih medali kompetisi mahasiswa	78	220	259	297	338
SK (Output) 5 : Mahasiswa Mulai Berwirausaha	-	2.900	3.100	3.300	3.500

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
yang mulai berwirusaha					
SK (Output) 6 : Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Penalaran dan Kreativitas	-	7.956	7.995	8.436	8.436
IKK 6.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang penalaran	-	693	705	916	916
IKK 6.2 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang kreativitas	-	7.263	7.290	7.520	7.520
SK (Output) 7 : Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	-	8.200	9.700	10.260	11.200
IKK 7.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang minat dan bakat	-	8.200	9.700	10.260	11.200
SK (Output) 8 : Organisasi Mahasiswa Melaksanakan Program Pemberdayaan	-	680	750	800	900
IKK 8.1 : Jumlah organisasi mahasiswa yang melaksanakan program pemberdayaan	-	680	750	800	900
SK (Output) 9 : Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Layanan Pusat Karir	34	200	150	200	250
IKK 9.1 : Jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan pendampingan Layanan Pusat Karir	34	200	150	200	250
IKK 9.2 : Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan Studi Penelusuran Lulusan ( <i>Tracer Study</i> )	-	-	150	200	250
SK (Output) 10 : Layanan Sistem	12	12	12	12	12

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kerja (Sindikker)					
IKK 10.1 : Jumlah layanan Sindikker	12	12	12	12	12
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi					
SK (Output) 1 : Program Studi Menerapkan SPMI	-	-	4.901	5.392	5.883
IKK 1.1 : Program studi mendapat fasilitas dan bimbingan teknis SPMI	-	-	4.901	5.392	5.883
SK (Output) 2 : Instrumen Uji Kompetensi	3	7	9	11	13
IKK 2.1 : Jumlah dokumen instrumen Uji Kompetensi	3	7	9	11	13
SK (Output) 3 : Mahasiswa Mengikuti Uji Kompetensi	133.000	140.000	145.000	150.000	155.000
IKK 3.1 : Jumlah peserta Uji Kompetensi	133.000	140.000	145.000	150.000	155.000
SK (Output) 4 : Instrumen Kompetensi Lulusan	3	1	1	1	1
IKK 4.1 : Jumlah dokumen instrumen kompetensi lulusan	3	1	1	1	1
SK (Output) 5 : Program Studi yang Dibina Menjadi Prodi Unggul	-	-	1.200	1.600	2.000
IKK 5.1 : Program studi mengikuti <i>Nurturing</i> Sistem Penjaminan Mutu Internal	-	-	1.200	1.600	2.000
SK (Output) 6 : Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.080	1.200	1.250	1.300	1.350
IKK 6.1 : Jumlah program studi penyelenggara Uji Kompetensi	1.080	1.200	1.250	1.300	1.350
SK (Output) 7 : Program Studi	-	-	688	755	830

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Mutu					
IKK 7.1 : Program studi mengikuti program asuh yang menuju Program Studi Unggul (26 PT Unggul)	-	-	520	570	630
IKK 7.2 : Penguatan Kopertis dalam Penjaminan Mutu Prodi (14 Kopertis)	-	-	168	185	200

2. Untuk mencapai Sasaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti					
SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, dan monitoring	3	3	3	3	3
IKK 1.2 : Jumlah dokumen laporan keuangan	1	1	1	1	1
IKK 1.3 : Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3
IKK 1.4 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN	12	12	12	12	12
IKK 1.5 : Jumlah layanan kepegawaian	12	12	12	12	12
SK (Output) 2 : Layanan Internal (Overhead)	12	12	12	12	12
IKK 2.1 : Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	12	12	12	12	12
IKK 2.2 : Pengadaan peralatan dan	12	12	12	12	12

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
fasilitas perkantoran					
SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
IKK 3.1 : Pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12
IKK 3.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi					
SK (Output) 1 : Rekomendasi Tata Kelembagaan Perguruan Tinggi	-	-	57	58	59
IKK 1.1 : Jumlah perubahan bentuk perguruan tinggi	-	-	52	52	52
IKK 1.2 : Jumlah perubahan status perguruan tinggi	-	-	5	6	7
SK (Output) 2 : Rekomendasi Pendirian dan Penutupan Perguruan Tinggi	112	55	29	22	22
IKK 2.1 : Jumlah pendirian perguruan tinggi	112	30	9	7	7
IKK 2.2 : Jumlah penutupan perguruan tinggi	-	25	20	15	15
SK (Output) 3 : Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi	-	400	405	400	400
IKK 3.1 : Jumlah pembukaan program studi	-	400	300	300	300
IKK 3.2 : Jumlah penutupan program studi	-	-	30	30	30
IKK 3.3 : Jumlah pembukaan program studi lainnya	-	-	75	70	70
SK (Output) 4 : Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	-	-	12	12	12
IKK 4.1 : Jumlah layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	-	-	12	12	12
IKK 4.2 : Jumlah layanan program studi untuk kebutuhan industri	-	-	12	12	12
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan					

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 1 : Layanan Tata Laksana dan Sistem Manajemen Mutu Kopertis	12	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis	12	12	12	12	12
SK (Output) 2 : Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	-	4.000	4.000	4.000	4.000
IKK 2.1 : Jumlah prodi terakreditasi	-	3.200	3.200	3.200	3.200
IKK 2.2 : Jumlah perguruan tinggi terakreditasi	-	800	800	800	800
SK (Output) 3 : Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	567	510	560	560	560
IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa asing (KNEB) penerima beasiswa	567	510	560	560	560
SK (Output) 4 : Perguruan Tinggi yang Meningkatkan Mutu Kelembagaannya	600	350	400	400	400
IKK 4.1 : Jumlah perguruan tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan	-	299	299	299	299
IKK 4.2 : Jumlah penerima bantuan PP-PTS	600	50	100	100	100
IKK 4.3 : Jumlah kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri	-	1	1	1	1
SK (Output) 5 : Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	-	3	3	4	5
IKK 5.1 : Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi perguruan tinggi Top 500 Dunia	-	3	3	4	5
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan					
SK (Output) 1 : Lembaga Litbang yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	27	45	60	80	100

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek					
IKK 1.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan	1	1	1	1	1
SK (Output) 2 : BPPD yang Dibina Menjadi BPPD Berkinerja Utama	5	10	15	15	15
IKK 2.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama	5	10	15	15	15
SK (Output) 3 : Pranata Litbang yang Terakreditasi	35	40	45	50	55
IKK 3.1 : Jumlah pranata Litbang terakreditasi yang dibina	30	35	40	45	50
IKK 3.2 : Jumlah pranata Litbang yang terakreditasi baru	5	5	5	5	5
Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya					
SK (Output) 1 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang Dikembangkan	8	9	10	10	10
IKK 1.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan	8	9	10	10	10
IKK 1.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya	1	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Lembaga Inkubator Teknologi yang Dikembangkan	-	10	7	7	7
IKK 2.1 : Jumlah Lembaga Inkubator Teknologi yang dikembangkan	-	10	7	7	7

3. Untuk mencapai Sasaran Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti					
SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	13	25	25	25
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	3	3	3	3	3
IKK 1.2 : Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3
IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan pengelolaan aset BMN	1	1	1	1	1
IKK 1.4 : Jumlah dokumen layanan kepegawaian	1	1	1	1	1
IKK 1.5 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	-	-	12	12	12
IKK 1.6 : Jumlah dokumen layanan pengembangan sistem SDID terintegrasi	-	1	1	1	1
IKK 1.7 : Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1	1	1	1
IKK 1.8 : Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	1	1	1	1
IKK 1.9 : Jumlah dokumen pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	-	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
IKK 2.1 : Jumlah operasional layanan perkantoran Satker	12	12	12	12	12
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi					
SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kebijakan Peningkatan Karir dan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi					
IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan karir SDM Dikti	1	1	1	1	1
SK (Output) 3 : Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SDM Dikti	2	2	2	2	2
IKK 3.1 : Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi pendidik	1	1	1	1	1
IKK 3.2 : Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi tenaga kependidikan	1	1	1	1	1
SK (Output) 4 : SDM DIKTI yang Mengikuti Pembinaan karir	12.500	16.000	16.100	16.300	16.500
IKK 4.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IKK 4.2 : Jumlah usulan angka kredit dosen yang dinilai	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
IKK 4.3 : Jumlah usulan angka kredit tenaga kependidikan yang dinilai	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IKK 4.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti riset untuk peningkatan karir	-	-	100	300	500
SK (Output) 5 : SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	1496	1880	2460	2510	2510
IKK 5.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi	490	790	1240	1290	1290
IKK 5.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
IKK 5.3 : Jumlah pendidik yang meraih prestasi	1	15	15	15	15
IKK 5.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi	5	75	105	105	105

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SDM Iptek					
SK (Output) 1 : SDM Iptek yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	200	200	200	200	200
IKK 1.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya	200	200	200	200	200
SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Iptek	1	1	1	1	1
IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek	1	1	1	1	1
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi					
SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12
SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikti	1	1	1	1	1
IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	1	1	1	1	1
SK (Output) 3 : PTN yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	108	108	118	118	118
IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1
IKK 3.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1
IKK 3.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
direvitalisasi sarana dan prasarannya					
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek					
SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Iptek	-	1	1	1	1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek	-	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Lembaga Litbang yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	-	-	15	17	19
IKK 2.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
IKK 2.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
IKK 2.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
IKK 2.4 : Jumlah lembaga Litbang yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	-	-	15	17	19
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi					
SK (Output) 1: Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12
SK (Output) 2 : Beasiswa SDM Dikti	12.036	12.035	13.132	12.845	12.767
IKK 2.1 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri	2.459	2.459	1.667	1.155	1.240
IKK 2.2 : Jumlah SDM Dikti	6.366	6.366	8.205	8.447	8.265





Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.2 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek					
SK (Output) 1 : Sistem Informasi Riset dan Pengembangan Iptek	1	1	1	1	1
IKK 1.1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Informasi Riset dan Pengembangan Iptek	1	1	1	1	1
SK (Output) 2 : <i>Technology Foresight</i>	1	1	2	1	1
IKK 2.1 : Jumlah <i>Technology Foresight</i>	1	1	2	1	1
SK (Output) 3 : Rekomendasi Kemitraan Riset dan Pengembangan	1	1	2	4	6
IKK 3.1 : Jumlah rekomendasi kemitraan riset dan pengembangan	1	1	1	2	3
IKK 3.1 : Jumlah fasilitas kemitraan riset dan pengembangan	1	1	1	2	3
SK (Output) 4 : Rekomendasi Kebijakan Implementasi RIRN dan Prioritas Riset Nasional	1	1	1	2	3
IKK 4.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan implementasi RIRN dan Prioritas Riset Nasional	1	1	1	2	3
SK (Output) 5: Sistem Aplikasi Risbang Iptek dan Pendidikan Tinggi Pengembangan Iptek	-	-	3	4	4
IKK 5.1 : Jumlah pengembangan sistem informasi SIMLITABMAS	-	-	3	4	4
Kegiatan: Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat					
SK (Output) 1 : Paket Penelitian di Bidang Kesehatan dan Obat			15	18	21
IKK 1.1.1 : Jumlah Paket Penelitian di			15	18	21

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 2: Layanan Internal	2	2	2	2	2
IKK 2.1 : Jumlah Layanan Internal	2	2	2	2	2
SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat					
SK (Output) 1 : Hasil Penelitian untuk Pengabdian Masyarakat	250	250	-	-	-
IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian	250	250	-	-	-
SK (Output) 2 : Prototipe Teknologi untuk Masyarakat	12	34	40	60	80
IKK 2.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat	12	34	40	60	80
Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat					
SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BOPTN) PTN Non Badan Hukum	12.47 0	14.340	15.40 9	18.96 5	21.80 1
IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi	12.47 0	14.340	15.40 9	18.96 5	21.80 1
SK (Output) 2 : Bantuan Pendanaan Penelitian di PTN Badan Hukum	7	7	11	14	17
IKK 2.1 : Jumlah PTN Badan Hukum menerima bantuan pendanaan penelitian	7	7	11	14	17
SK (Output) 3 : Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (BOPTN) PTN Badan Hukum	-	-	-	1.000	1.500
IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	-	-	-	1.000	1.500
SK (Output) 4 : Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (BOPTN) PTN Non Badan Hukum	3.000	3.500	2.000	4.500	5.000
IKK 4.1 : Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	3.000	3.500	2.000	4.500	5.000

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Industri					
SK (Output) 1 : Prototipe Hasil Pengembangan Teknologi di Industri	5	15	20	25	30
IKK 1.1 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang energi dan transportasi	-	-	5	7	8
IKK 1.2 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang pangan, kesehatan, dan obat	-	-	5	7	8
IKK 1.3 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang Hankam dan TIK	-	-	5	6	7
IKK 1.4 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang bahan baku dan material maju	-	-	5	5	7
SK (Output) 2 : Hasil Penelitian untuk Pengabdian Masyarakat	-	-	235	250	250
IKK 2.1 : Jumlah hasil penelitian	-	-	235	250	250
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian					
SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	1	1	1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual	-	-	1	1	1
SK (Output) 2 : Sentra Kekayaan Intelektual yang Dibina dan Diperkuat	17	20	20	25	29
IKK 2.1 : Jumlah sentra kekayaan intelektual yang dibina dan diperkuat	17	20	20	23	26
IKK 2.2 : Jumlah pelatihan TOT	-	-	1	2	3
SK (Output) 3 : Kekayaan Intelektual untuk Didanat dan Didaftarkan	20	20	40	46	52
IKK 3.1 : Jumlah non paten yang didaftarkan	-	-	20	23	26
IKK 3.2 : Jumlah paten yang	20	20	20	23	26

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 4 : Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Perijinan Penelitian Asing dan Berisiko Tinggi dan Berbahaya	-	-	1	1	1
IKK 4.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya	-	-	1	1	1
SK (Output) 5 : Mitra Pendamping Peneliti Asing yang Difasilitasi	-	-	5	20	30
IKK 5.1 : Jumlah mitra pendamping peneliti asing yang difasilitasi	-	-	5	20	30
SK (Output) 6 : Aplikasi Riset Peneliti Asing yang Diproses	550	600	650	675	700
IKK 6.1 : Jumlah aplikasi riset peneliti asing	550	600	650	675	700
SK (Output) 7 : Teknologi yang Divaluasi	-	15	15	20	25
IKK 7.1 : Jumlah teknologi hasil litbang yang divalusi	-	15	15	20	25
SK (Output) 8 : Rekomendasi Kebijakan Dibidang Fasilitasi Jurnal Ilmiah	-	-	1	1	1
IKK 8.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah	-	-	1	1	1
SK (Output) 9 : Jurnal Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya	-	-	9	11	13
IKK 9.1 : Jumlah Jurnal Ilmiah Nasional yang difasilitasi untuk diakreditasi	-	-	5	6	7
IKK 9.2 : Jumlah Jurnal Ilmiah Nasional yang difasilitasi menjadi bereputasi Internasional	-	-	4	5	6
SK (Output) 10 : Fasilitasi Akses Basis Data Jurnal Ilmiah Internasional	-	-	16,00	20,00	24,00
IKK 10.1 : Jumlah basis data jurnal ilmiah internasional (non perguruan	-	-	0	0	0

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 11 : Rekomendasi Kebijakan Dibidang Fasilitasi Publikasi Ilmiah	-	-	1	1	1
IKK 11.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang fasilitasi publikasi ilmiah	-	-	1	1	1
SK (Output) 12 : Artikel Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya	-	-	100	110	120
IKK 12.1 : Jumlah artikel ilmiah yang ditingkatkan mutunya untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi	-	-	50	55	60
IKK 12.2 : Jumlah artikel ilmiah yang ditingkatkan mutunya untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi	-	-	50	55	60
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi					
SK (Output) 1 : Kekayaan intelektual yang didaftarkan dari Hasil Litbang Perguruan Tinggi	1.580	1.725	1.910	2.100	2.300
IKK 1.1 : Jumlah kekayaan intelektual yang didaftar dari hasil Litbang perguruan tinggi	1.580	1.725	1.910	2.100	2.300
SK (Output) 2 : Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi yang Difasilitasi untuk Diakreditasi	-	-	70	80	100
IKK 2.1 : Jumlah Jurnal Ilmiah Nasional dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk diakreditasi	-	-	45	50	60
IKK 2.2 : Jumlah Jurnal Ilmiah Nasional dari perguruan tinggi yang difasilitasi menjadi bereputasi Internasional	-	-	25	30	40
SK (Output) 3 : Fasilitasi Akses Basis Data Jurnal Ilmiah Internasional	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
ilmiah internasional untuk perguruan tinggi	000	00	000	000	.000
SK (Output) 4 : Artikel Ilmiah dari perguruan tinggi yang Difasilitasi untuk Dipublikasikan	1.500	1.500	2.100	4.200	6.300
IKK 4.1 : Jumlah artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi	500	500	600	1.200	1.800
IKK 4.2 : Jumlah artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi	1.000	1.000	1.500	3.000	4.500

5. Untuk mencapai Sasaran Program Penguatan Inovasi, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi					
SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	-	6	6	6
IKK 1.1 : Jumlah dokumen RKA	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah laporan kinerja	-	-	1	1	1
IKK 1.3 : Jumlah layanan dukungan manajemen	-	-	4	4	4
SK (Output) 2 : Layanan Internal (Overhead)	-	-	12	12	12
IKK 2.1 : Jumlah layanan internal	-	-	12	12	12
SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran	-	-	12	12	12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi					
SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan	-	4	5	12	5

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sistem Inovasi					
IKK 1.1 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan penguatan inovasi	-	1	1	2	1
IKK 1.2 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan integrasi sistem informasi inovasi nasional	-	1	1	2	1
IKK 1.3 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan penguatan kemitraan strategis dan wahana inovasi	-	1	1	2	1
IKK 1.4 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan diseminasi ( <i>outreach</i> ) hasil produk inovasi	-	1	1	2	1
IKK 1.5 : Jumlah kebijakan teknis penguatan inovasi	-	-	1	2	1
SK (Output) 2 : Klaster Inovasi	-	-	7	10	10
IKK 2.1 : jumlah kabupaten/kota yang menjadi daerah regionalisasi inovasi	-	-	7	10	10
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek					
SK (Output) 1: Paket Promosi Iptek	-	12	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah Paket Promosi Iptek	-	12	12	12	12
SK (Output) 2: Layanan Internal (Overhead)	-	1	1	1	1
IKK 2.1 : Jumlah Layanan Internal (Overhead)	-	1	1	1	1
SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	-	12	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah Layanan Perkantoran	-	12	12	12	12
SK (Output) 4 : Gedung/Bangunan yang direnovasi/dibangun	-	-	1	1	1
IKK 4.1: Jumlah gedung/bangunan yang direnovasi/dibangun	-	-	1	1	1
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi					
SK (Output) 1 Tenant yang dibina	-	25	45	50	55

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Teknologi (PPBT)					
IKK 1.1 : Jumlah kebijakan teknis tatakelola dan tatalaksana bagi inkubator	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah kebijakan teknis tatakelola dan tatalaksana bagi PPBT	-	-	1	1	1
IKK 1.3 : Jumlah produk inovasi yang dihasilkan PPBT	-	-	45	50	55
IKK 1.4 : Jumlah kerjasama antar PPBT dan antara PPBT dengan industri/pelaku usaha besar	-	-	1	1	1
IKK 1.5 : Jumlah PPBT binaan yang berhasil mandiri	-	-	1	1	1
SK (Output) 2 : Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	-	-	35	40	45
IKK 2.1 : Jumlah kebijakan teknis penguatan inovasi PPBT dari perguruan tinggi	-	-	1	1	1
IKK 2.2 : Jumlah produk inovasi yang dihasilkan PPBT dari perguruan tinggi	-	-	35	40	45
IKK 2.3 : Jumlah PPBT dari perguruan tinggi yang menjadi mandiri	-	-	1	1	1
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi					
SK (Output) 1 : Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	-	50	70	75	85
IKK 1.1 : Jumlah kebijakan teknis pembinaan Calon PPBT	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	-	-	70	75	85

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 1 : Dokumen Layanan Perencanaan	4	4	4	4	4
IKK 1.1 : Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan Anggaran	3	3	3	3	3
IKK 1.2 : Dokumen penyusunan standar satuan biaya pendidikan tinggi	1	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Dokumen Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	3	3	3
IKK 2.1 : Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran	-	-	3	3	3
IKK 2.2 : Layanan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	-	-	12	12	12
IKK 2.3 : Tingkat kepatuhan penyampaian data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi ke stakeholder terkait	-	-	100	100	100
SK (Output) 3 : Dokumen Layanan Akuntabilitas dan Pelaporan	4	4	4	4	4
IKK 3.1 : Jumlah layanan akuntabilitas dan pelaporan	2	2	2	2	2
IKK 3.2 : Jumlah dokumen Laporan Kinerja eselon 1 dan kementerian	2	2	2	2	2
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
SK (Output) 1 : Dokumen Layanan Manajemen SDM	-	4	4	4	4
IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan perencanaan dan pengembangan	-	3	3	3	3
IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan mutasi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, disiplin, dan pemberhentian	-	3	3	3	3

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2015	2016	2017	2018	2019
	2015	2016	2017	2018	2019
yang berhasil menjadi PPBT					
Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri					
SK (Output) 1 : Produk Inovasi Litbang di Industri	-	35	45	100	100
IKK 1.1 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan teknis inovasi Litbang di industri	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah produk inovasi Litbang di industry	-	-	45	100	100
IKK 1.3 : <i>Indonesia Innovation Forum</i>	-	-	1	1	1
Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri					
SK (Output) 1 : Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	-	5	11	25	25
IKK 1.1 : Jumlah kebijakan /bauran kebijakan teknis inovasi perguruan tinggi di industri	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah produk inovasi perguruan tinggi di industri	-	-	11	25	25
IKK 1.3 : Jumlah model/percontohan transfer <i>technology office</i>	-	-	1	5	5
IKK 1.4 : Jumlah model/percontohan <i>teaching industry/teaching factory</i>	-	-	1	1	1
IKK 1.5 : Jumlah klaster inovasi	-	-	1	2	3

6. Untuk mencapai Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja					

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
mutasi jabatan fungsional					
IKK 1.4 : Jumlah dokumen layanan sistem informasi dan kinerja	-	3	3	3	3
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum					
SK (Output) 1 : Layanan Manajemen BMN	-	-	12	12	12
IKK 1.1 : Jumlah layanan pengelolaan BMN	-	-	12	12	12
IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan pelaporan keuangan BMN	-	-	2	2	2
SK (Output) 2 : Layanan Protokol	-	-	12	12	12
IKK 2.1 : Jumlah layanan keprotokolan	-	-	12	12	12
SK (Output) 3 : Layanan Umum	-	-	2	2	2
IKK 3.1 : Jumlah dokumen layanan kepegawaian dan ketatalaksanaan	-	-	1	1	1
IKK 3.2 : Jumlah dokumen layanan persuratan dan kearsipan	-	-	1	1	1
SK (Output) 4 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
IKK 4.1 : Gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12
IKK 4.2 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan					
SK (Output) 1 : Layanan Manajemen Keuangan	-	-	32	36	40
IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan perbendaharaan	-	-	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan laporan keuangan	-	-	2	2	2
IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan PTN PKBLU dan PNEBP	-	-	28	32	36
IKK 1.4 : Jumlah dokumen kerugian negara	-	-	1	1	1
Kegiatan : Pembinaan dan					

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK (Output) 1 : Layanan Hukum	-	-	2	2	2
IKK 1.1 : Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan	-	-	50	40	35
IKK 1.2 : Jumlah layanan advokasi hukum	-	-	12	12	15
SK (Output) 2 : Layanan Manajemen Organisasi	-	-	23	29	33
IKK 2.1 : Jumlah dokumen layanan kelembagaan	-	-	8	9	8
IKK 2.2 : Jumlah layanan ketatalaksanaan	-	-	15	20	25
SK (Output) 3 : Layanan Reformasi Birokrasi	-	-	3	2	2
IKK 3.1 : Jumlah dokumen layanan reformasi birokrasi	-	-	3	2	2
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik					
SK (Output) 1 : Dokumen Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	3	3	3	3	3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan kerjasama dalam negeri	1	1	1	1	1
IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan publikasi dan dokumentasi	1	1	1	1	1
IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan komunikasi publik	1	1	1	1	1
IKK 1.4 : Jumlah dokumen sistem informasi kerjasama	1	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Dokumen Layanan Kerjasama Internasional	1	1	1	1	1
IKK 2.1 : Jumlah dokumen layanan kerjasama internasional	1	1	1	1	1
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
SK (Output) 1 : Layanan Internal	-	3	3	3	3

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
hukum					
IKK 1.2 : Layanan keuangan dan perlengkapan	-	1	1	1	1
IKK 1.3 : Layanan perencanaan, protokol dan humas	-	1	1	1	1
SK (Output) 2 : Layanan Kerjasama	-	15	20	25	30
IKK 2.1 : Jumlah kerjasama Puspiptek dengan pihak ketiga	-	15	20	25	30
IKK 2.2 : <i>Updating</i> basis data potensi kawasan Puspiptek	-	-	1	1	1
SK (Output) 3 : Layanan Bisnis Teknologi	-	20	15		
IKK 3.1 : Jumlah tenan yang diinkubasi	-	20	20	20	20
SK (Output) 4 : Layanan Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	3	3	3	3
IKK 4.1 : Sarana dan prasarana kawasan yang dikelola dengan baik	3	2	1	1	1
IKK 4.2 : Sarana dan prasarana kawasan yang telah direvitalisasi	2	1	1	1	1
IKK 4.3 : Layanan keamanan dan keselamatan	-	-	1	1	1
SK (Output) 5 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
IKK 5.1 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti					
SK (Output) 1 : Layanan Data dan Informasi	-	3	3	3	3
IKK 1.1 : Jumlah <i>draft</i> kebijakan standar pengelolaan data, informasi, dan NSPK TIK Iptek Dikti.	-	8	10	11	14
IKK 1.2 : Tersedianya informasi geospasial tematik untuk	-	2	5	11	16

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
kewilayahan yang dihasilkan					
IKK 1.3 : Rasio data dan informasi yang tidak sesuai <i>quality standard</i>	-	10%	9%	8%	7%
IKK 1.4 : Jumlah laporan indikator Iptek	-	1	1	1	1
IKK 1.5 : Rasio kelengkapan data pendidikan tinggi terhadap standar nasional pendidikan tinggi	-	60%	75%	85%	100%
IKK 1.6 : Jumlah jaringan pengelola data, informasi dan TIK Iptek Dikti yang terbangun dan aktif	-	22	23	24	25
IKK 1.7 : Rasio program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi yang memanfaatkan TIK terhadap total program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi Kernenristekdikti	-	24%	73%	94%	100%
IKK 1.8 : Service Level Index (SLI) Layanan Pustadin Iptek Dikti	-	70%	80%	85%	90%
SK (Output) 2 : Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12
IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran	-	-	12	12	12
SK (Output) 3 : Layanan Internal	-	-	3	3	3
IKK 3.1 : Dukungan pelaksanaan tugas fungsi tata usaha	-	-	3	3	3
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan					
SK (Output) 1 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	3	3	3	3
IKK 1.1 : Jumlah pegawai peserta diklat struktural	-	320	300	200	200
IKK 1.2 : Jumlah pegawai peserta diklat prajabatan	-	3.500	3.500	3.000	3.000
IKK 1.3 : Jumlah pegawai peserta diklat teknis	-	450	500	750	850
SK (Output) 2 : Layanan Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan		3	6	6	6

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			
	2015	2016	2017	2018
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I				
SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah I	100	100	100	100
IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah I				
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II				
SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah II	100	100	100	100
IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah II	100	100	100	100
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III				
SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah III	100	100	100	100
IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah III	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Kemenristekdikti mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga anggaran pinjaman Hibah Luar Negeri.

Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Total anggaran tahun 2015-2019 yang dibutuhkan Kemenristekdikti adalah sebesar 221,48 triliun rupiah untuk Program-Program Teknis dan Dukungan Manajemen. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran 1.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			
	2015	2016	2017	2018
dan evaluasi diklat				
IKK 2.2 : Jumlah dokumen kerjasama diklat	-	1	1	1
IKK 2.3 : Jumlah dokumen penjaminan mutu	-	1	1	1
SK (Output) 3 : Layanan Internal	-	-	3	3
IKK 3.1 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi tata usaha	-	-	3	3
SK (Output) 4 : Layanan Perkantoran	-	12	12	12
IKK 4.1 : Layanan operasional perkantoran	-	12	12	12
IKK 4.2 : Sarana dan prasarana perkantoran	-	10	10	10

7. Untuk mencapai Sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			
	2015	2016	2017	2018
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti				
SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	43	43	43	43
IKK 1.1 : Jumlah layanan dukungan manajemen eselon 1	43	43	43	43
SK (Output) 2 : Layanan Internal (Overhead)	4	4	4	4
IKK 2.1 : Jumlah layanan internal (Overhead )	550	650	675	700
IKK 2.2 : Renovasi Gedung	2.822	2.822	2.822	2.822
SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12
IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran	12	12	12	12



V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenristekdikti, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenristekdikti. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran Kemenristekdikti dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemenristekdikti.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Telah diperiksa dan disetujui:

Kepala Biro Perencanaan		Kepala Biro Hukum dan Organisasi		Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

Selain dari APBN dan Pinjaman Luar Negeri, Kemenristekdikti akan berupaya agar pihak swasta dapat memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek melalui skema *Public Private Partnership (PPP)*.

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

KERANGKA PENDANAAN

Pro gra m/ Keg iatan n	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan						43.000.733	40.525.874	39.732.340	46.169.168	52.057.116	Direktor at Jenderal Pembela jaran Dan Kemaha
							6.660.738	6.268.135	6.647.914	7.645.101	8.791.867	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												siswaan
	SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi											
	IKP 1.1 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	26,86%	28,16%	31,75%	32,05%	32,55%						
	IKP 1.2 : Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000						
	IKP 1.3 : Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	55%	60%	63%	66%	70%						
	IKP 1.4 : Persentase prodi terakreditasi minimal B	-	40%	42%	44%	46%						
	IKP 1.5 : Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja	50%	60%	65%	70%	75%						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKP 1.6 : Persentase perguruan tinggi yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	-	50%	75%	77,5%	80%						
	IKP 1.7 : Jumlah mahasiswa berprestasi	-	390	3.500	3.850	4.235						
	IKP 1.8 : Persentase Mahasiswa yang Lulus PPG	-	95%	96%	97%	98%						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan							-	2.288.234	1.870.081	2.264.997	2.717.997	Sekretar iat Direktor at Jenderal Pembela jaran dan Kemaha siswaan
	SK (Output) 1 : Sistem	-	2	2	2	2	-	100.000	150.000			

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Informasi SNMPTN dan SBMPTN									200.000	240.000	
	IKK 1.1 : Jumlah sistem informasi SNMPTN dan SBMPTN	-	2	2	2	2						
	SK (Output) 2 : Layanan Pelaksanaan PHLN	-	9	9	9	9	-	2.162.234	1.672.650	2.007.180	2.408.616	
	IKK 2.1 : Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	9	9	9	9	-	-	-	-	-	
	SK (Output) 3 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	-	12	12	12	-	-	20.931	25.117	30.141	
	IKK 3.1 : Jumlah layanan perencanaan program dan anggaran	-	-	12	12	12						
	IKK 3.2 : Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	-	-	12	12	12						
	IKK 3.3 : Jumlah layanan keuangan dan perbendaharaan	-	-	12	12	12						
	IKK 3.4 : Jumlah layanan	-	-	12	12	12						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	data dan informasi											
	IKK 3.5 : Jumlah layanan hukum, humas, kerjasama, dan protokol	-	-	12	12	12						
	IKK 3.6 : Jumlah layanan kepegawaian	-	-	12	12	12						
	IKK 3.7 : Jumlah layanan umum, perlengkapan, dan rumah tangga	-	-	12	12	12						
	IKK 3.8 : Jumlah layanan pimpinan Eselon II	-	-	12	12	12						
	SK (Output) 4 : Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )	-	-	1	1	1	-	-	500	1.500	1.800	
	IKK 4.1 : Pengadaan perlengkapan operasional perkantoran	-	-	1	1	1						
	IKK 4.2 : Pengadaan kendaraan operasional pimpinan dan perkantoran	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 5 : Layanan	12	12	12	12	12	-	26.000				

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perkantoran								26.000	31.200	37.440	
	IKK 5.1 : Pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12						
	IKK 5.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran									346.571,43	454.885,71	545.862,86	Direktor at Pembela jaraan
	SK (Output) 1 : Dosen Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Berorientasi KKNI	-	-	10.000	12.500	15.000	-	-	9.500	11.400	13.680	
	IKK 1.1 : Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan	-	-	9.940	12.420	14.900						
	IKK 1.2 : Jumlah dosen yang menyusun pedoman pembelajaran	-	-	30	40	50						
	IKK 1.3 : Jumlah dosen yang menyusun bahan	-	-	30	40	50						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	ajar											
	SK (Output) 2 : Mahasiswa Mengikuti Program Transfer Kredit	-	-	1.500	2.000	2.500	-	-	9.500	11.400	13.680	
	IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa mengikuti program transfer kredit	-	-	1.500	2.000	2.500						
	SK (Output) 3 : Layanan Ijazah Pendidikan Tinggi	-	-	12	12	12	-	-	1.500	1.800	2.160	
	IKK 3.1 : Jumlah layanan penyetaraan ijazah luar negeri	-	-	12	12	12						
	IKK 3.2 : Jumlah layanan pencegahan ijazah palsu	-	-	12	12	12						
	SK (Ouput) 4 : Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	-	175	225	250	300	-	-	1.500	1.800	2.160	
	IKK 4.1 : Jumlah program studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	-	175	225	250	300						



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 5 : Perguruan Tinggi Menerapkan SNIKTI	-	46	525	665	810	-	-	31.000	7.200	44.640	
	IKK 5.1 : Jumlah perguruan tinggi yang menerapkan SNIKTI	-	-	300	400	500						
	IKK 5.2 : Jumlah LPTK yang meningkatkan mutu pembelajaran	-	46	65	75	90						
	IKK 5.3 : Jumlah perguruan tinggi vokasi yang menerapkan pembelajaran melampaui SNIKTI	-	-	160	190	220						
	SK (Output) 6 : Pendidik dan Calon Pendidik yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru	-	9.298	20.000	25.000	30.000	-	-	293.571	352.286	422.743	
	IKK 6.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru			120.000	120.000	120.000						
	IKK 6.2 : Jumlah calon	-	6.278	17.000	22.000	27.000						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru											
	IKK 6.3 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi	-	3.020	3.000	3.000	3.000						
	SK (Output) 7 : Program Studi Mengembangkan <i>Joint Curriculum</i>	-	-	300	400	500	-	-	-	4.000	4.800	
	IKK 7.1 : Jumlah program studi yang mengembangkan <i>Joint Curriculum</i>	-	-	300	400	500						
	SK (Output) 8 : Perguruan Tinggi Menerapkan Pembelajaran Khusus dan Difabel	-	-	150	200	250	-	-	-	20.000	24.000	
	IKK 8.1 : Jumlah perguruan tinggi menerapkan	-	-	150	200	250						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pembelajaran khusus dan difabel											
	SK (Output) 9 : Matakuliah yang Diterapkan Program Studi dengan PJJ	-	-	500	700	900	-	-	-	15.000	18.000	
	IKK 9.1 : Matakuliah yang diterapkan program studi dengan PJJ	-	-	500	700	900						
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir							-	-	4.367.950	5.241.540	6.289.848	Direktor at Kemaha siswaan
	SK (Output) 1 : Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369	-	-	3.650.996	4.381.195	5.257.434	
	IKK 1.1 : Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369						
	SK (Output) 2 : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	-	3.277	5.474	8.541	13.014	-	-	82.054	98.465	118.158	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	-	3.277	5.474	8.541	13.014						
	SK (Output) 3 : Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA	121.000	61.904	120.000	280.000	340.000	-	-	504.000	04.800	725.760	
	IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan PPA	121.000	61.904	120.000	280.000	340.000						
	SK (Output) 4 : Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	78	220	259	297	338	-	-	7.500	9.000	10.800	
	IKK 4.1 : Jumlah beasiswa peraih medali kompetisi mahasiswa	78	220	259	297	338						
	SK (Output) 5 : Mahasiswa Mulai Berwirausaha	-	2.900	3.100	3.300	3.500	-	-	10.000	12.000	14.400	
	IKK 5.1 : Jumlah mahasiswa yang mulai	-	2.900	3.100	3.300	3.500						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	berwirausaha											
	SK (Output) 6 : Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Penalaran dan Kreativitas	-	7.956	7.995	8.436	8.436	-	-	67.450	80.940	97.128	
	IKK 6.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang penalaran	-	693	705	916	916						
	IKK 6.2 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang kreativitas	-	7.263	7.290	7.520	7.520						
	SK (Output) 7 : Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	-	8.200	9.700	10.260	11.200	-	-	17.450	20.940	25.128	
	IKK 7.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang minat dan bakat	-	8.200	9.700	10.260	11.200						
	SK (Output) 8 : Organisasi Mahasiswa Melaksanakan	-	680	750	800	900	-	-		21.600	25.920	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Program Pemberdayaan								18.000			
	IKK 8.1 : Jumlah organisasi mahasiswa yang melaksanakan program pemberdayaan	-	680	750	800	900						
	SK (Output) 9 : Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Layanan Pusat Karir	34	200	150	200	250	-	-	7.000	8.400	10.080	
	IKK 9.1 : Jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan pendampingan Layanan Pusat Karir	34	200	150	200	250						
	IKK 9.2 : Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	-	-	150	200	250						
	SK (Output) 10 : Layanan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker)	12	12	12	12	12	-	-	3.500	4.200	5.040	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 10.1 : Jumlah layanan Sindikker	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi							-	-	74.350	89.220	107.064	Direktor at Penjami nan Mutu
	SK (Output) 1 : Program Studi Menerapkan SPMI	-	-	4.901	5.392	5.883	-	-	14.250	17.100	20.520	
	IKK 1.1 : Program studi mendapat fasilitasi dan bimbingan teknis SPMI	-	-	4.901	5.392	5.883						
	SK (Output) 2 : Instrumen Uji Kompetensi	3	7	9	11	13	5.402	14.500	12.800	15.360	18.432	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen instrumen Uji Kompetensi	3	7	9	11	13						
	SK (Output) 3 : Mahasiswa Mengikuti Uji Kompetensi	133.000	140.000	145.000	150.000	155.000	-	4.500	4.000	4.800	5.760	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 3.1 : Jumlah peserta Uji Kompetensi	133.000	140.000	145.000	150.000	155.000						
	SK (Output) 4 : Instrumen Kompetensi Lulusan	3	1	1	1	1	896	-	2.000	2.400	2.880	
	IKK 4.1 : Jumlah dokumen instrumen kompetensi lulusan	3	1	1	1	1						
	SK (Output) 5 : Program Studi yang Dibina Menjadi Prodi Unggul	-	-	1.200	1.600	2.000	-	-	17.200	20.640	24.768	
	IKK 5.1 : Program studi mengikuti <i>Nurturing</i> Sistem Penjaminan Mutu Internal	-	-	1.200	1.600	2.000						
	SK (Output) 6 : Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.080	1.200	1.250	1.300	1.350	-	-	6.900	8.280	9.936	
	IKK 6.1 : Jumlah program studi penyelenggara Uji Kompetensi	1.080	1.200	1.250	1.300	1.350						
	SK (Output) 7 : Program	-	-	688	755	830	-	-	17.200	20.640	24.768	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Studi Menerima Revitalisasi Penguatan Mutu											
	IKK 7.1 : Program studi mengikuti program asuh yang menuju Program Studi Unggul (26 PT Unggul)	-	-	520	570	630						
	IKK 7.2 : Penguatan Kopertis dalam Penjaminan Mutu Prodi (14 Kopertis)	-	-	168	185	200						
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti							1.010.013	926.877	1.202.089	1.382.403	1.589.763	Direktor at Jenderal Kelemba gaan Iptek dan Dikti

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SP (Outcome) 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti											
	IKP 2.1 : Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia	2	3	3	4	5						
	IKP 2.2 : Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)	29	39	59	80	110						
	IKP 2.3 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature	6	14	16	19	22						
	IKP 2.4 : Jumlah Pusat Unggulan Iptek	12	15	30	35	40						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti							18.000	45.943	43.732	42.500	42.500	Sekretar iat Direktor at Jenderal Kelemba gaan

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												Iptek dan Dikti
	SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	12	12	12	12	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, dan monitoring	3	3	3	3	3						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen laporan keuangan	1	1	1	1	1						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3						
	IKK 1.4 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN	12	12	12	12	12						
	IKK 1.5 : Jumlah layanan kepegawaian	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Layanan	-	12	12	-	-	-	3.443	1.232	-	-	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Internal ( <i>Overhead</i> )											
	IKK 2.1 : Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	-	12	12	-	-						
	IKK 2.2 : Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	12	12	-	-						
	SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	IKK 3.1 : Pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12						
	IKK 3.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi							-	233.000	336.102	336.102	336.102	Direktor at Pengem bangan Kelemba gaan Perguru

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												an Tinggi
	SK (Output) 1 : Rekomendasi Tata Kelembagaan Perguruan Tinggi	-	-	57	58	59	-	-	9.500	9.500	9.500	
	IKK 1.1 : Jumlah perubahan bentuk perguruan tinggi	-	-	52	52	52						
	IKK 1.2 : Jumlah perubahan status perguruan tinggi	-	-	5	6	7						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Pendirian dan Penutupan Perguruan Tinggi	112	55	29	22	22	-	12.000	13.500	13.500	13.500	
	IKK 2.1 : Jumlah pendirian perguruan tinggi	112	30	9	7	7						
	IKK 2.2 : Jumlah penutupan perguruan tinggi	-	25	20	15	15						
	SK (Output) 3 : Rekomendasi	-	400	405	400	400	-	-	36.602,15			

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pembukaan dan Penutupan Program Studi									36.602,15	36.602,15	
	IKK 3.1 : Jumlah pembukaan program studi	-	400	300	300	300						
	IKK 3.2 : Jumlah penutupan program studi	-	-	30	30	30						
	IKK 3.3 : Jumlah pembukaan program studi lainnya	-	-	75	70	70						
	SK (Output) 4 : Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	-	12	12	12	12	-	221.000	276.500	276.500	276.500	
	IKK 4.1 : Jumlah layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	-	12	12	12	12						
	IKK 4.2 : Jumlah layanan program studi untuk kebutuhan industri	-	-	12	12	12						
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi							468.215,20	428.820,23	442.820,23	443.820,23	443.820,23	Direktor at

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												Pembina an Kelemba gaan Perguru an Tinggi
	SK (Output) 1 : Layanan Tata Laksana dan Sistem Manajemen Mutu Kopertis	12	12	12	12	12	134.495,20	105.000	119.000	120.000	120.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	
	IKK 2.1 : Jumlah prodi terakreditasi	-	3.200	3.200	3.200	3.200						
	IKK 2.2 : Jumlah perguruan tinggi	-	800	800	800	800						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	terakreditasi											
	SK (Output) 3 : Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	567	510	560	560	560	33.720	28.000	28.000	28.000	28.000	
	IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa asing (KNB) penerima beasiswa	567	510	560	560	560						
	SK (Output) 4 : Perguruan Tinggi yang Meningkatkan Mutu Kelembagaannya	600	350	400	400	400	300.000	88.620,23	88.620,23	88.620,23	88.620,23	
	IKK 4.1 : Jumlah perguruan tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan	-	299	299	299	299						
	IKK 4.2 : Jumlah penerima bantuan PP-PTS	600	50	100	100	100						
	IKK 4.3 : Jumlah kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri	-	1	1	1	1						



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 5 : Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	-	3	3	4	5	-	7.200	7.200	7.200	7.200	
	IKK 5.1 : Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi perguruan tinggi Top 500 Dunia	-	3	3	4	5						
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan							19.131	22.000	49.000	70.000	91.500	Direktor at Lembag a Peneliti an dan Pengem bangan
	SK (Output) 1 : Lembaga Litbang yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	27	45	60	80	100	16.145	15.500	42.500	61.500	81.500	
	IKK 1.1 : Jumlah lembaga Litbang yang dibina	27	45	60	80	100						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	menjadi Pusat Unggulan Iptek											
	IKK 1.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : BPPD yang Dibina Menjadi BPPD Berkinerja Utama	5	10	15	15	15	1.131	3.000	3.000	4.000	5.000	
	IKK 2.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama	5	10	15	15	15						
	SK (Output) 3 : Pranata Litbang yang Terakreditasi	35	40	45	50	55	1.855	3.500	3.500	4.500	5.000	
	IKK 3.1 : Jumlah pranata Litbang terakreditasi yang dibina	30	35	40	45	50						
	IKK 3.2 : Jumlah pranata Litbang yang terakreditasi baru	5	5	5	5	5						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya							118.000	141.500	150.500	150.500	150.500	Direktor at Kawasa n Sains dan Teknolo gi dan Lembag a Penunja ng Lainnya
	SK (Output) 1 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang Dikembangkan	8	9	10	10	10	118.000	139.500	115.500	115.500	115.500	
	IKK 1.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan	8	9	10	10	10						
	IKK 1.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan	1	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya											
	SK (Output) 2 : Lembaga Inkubator Teknologi yang Dikembangkan	-	10	7	7	7	-	2.000	35.000	35.000	35.000	
	IKK 2.1 : Jumlah Lembaga Inkubator Teknologi yang dikembangkan	-	10	7	7	7						
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti							8.153.470	2.995.565	7.755.003	7.780.775	7.637.830	Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
	SP (Outcome) 3 : Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas											

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	sumber daya Iptek dan Dikti											
	IKP 3.1 : Persentase dosen berkualifikasi S3	10,05%	11,32%	13,09%	14,86%	16,63%						
	IKP 3.2 : Jumlah SDM yang meningkat Karirnya	12.901	17.392	19.228	20.364	21.500						
	IKP 3.3 : Jumlah SDM yang kompetensinya	871	1.347	2.141	2.641	3.061						
	IKP 3.4 : Jumlah revitalisasi sarpras PTN	108	108	118	118	118						
	IKP 3.5 : Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3	5,5%	6%	6,2%	6,4%	6,8%						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti							43.500	62.000	222.000	222.000	222.000	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												Dikti
	SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	13	25	25	25	33.500	52.000	207.000	207.000	207.000	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	3	3	3	3	3						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan pengelolaan aset BMN	1	1	1	1	1						
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen layanan kepegawaian	1	1	1	1	1						
	IKK 1.5 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	-	-	12	12	12						
	IKK 1.6 : Jumlah	-	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen layanan pengembangan sistem SDID terintegrasi											
	IKK 1.7 : Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1	1	1	1						
	IKK 1.8 : Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	1	1	1	1						
	IKK 1.9 : Jumlah dokumen pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
	IKK 2.1 : Jumlah operasional layanan perkantoran Satker	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi							85.550	85.550	196.050	199.050	202.550	Direktor at Karier dan Kompete

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												nsi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Karir dan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi	1	1	1	1	1	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan karir SDM Dikti	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 : Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SDM Dikti	2	2	2	2	2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	IKK 3.1 : Jumlah sistem pengelolaan data dan	1	1	1	1	1						



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	informasi pendidik											
	IKK 3.2 : Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi tenaga kependidikan	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 4 : SDM DIKTI yang Mengikuti Pembinaan karir	12.500	16.000	16.100	16.300	16.500	34.000	34.000	36.500	37.500	40.000	
	IKK 4.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	IKK 4.2 : Jumlah usulan angka kredit dosen yang dinilai	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500						
	IKK 4.3 : Jumlah usulan angka kredit tenaga kependidikan yang dinilai	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	IKK 4.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti riset untuk peningkatan karir	-	-	100	300	500						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 5 : SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	1496	1880	2460	2510	2510	40.550	40.550	147.550	149.550	150.550	
	IKK 5.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi	490	790	1240	1290	1290						
	IKK 5.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100						
	IKK 5.3 : Jumlah pendidik yang meraih prestasi	1	15	15	15	15						
	IKK 5.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi	5	75	105	105	105						
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Iptek							5.000	5.000	5.000	11.500	11.500	Direktor at Karier dan Kompete nsi Sumber

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												Daya Manusia
	SK (Output) 1 : SDM Iptek yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	200	200	200	200	200	3.000	3.000	3.000	9.500	9.500	
	IKK 1.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya	200	200	200	200	200						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Iptek	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek	1	1	1	1	1						
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi							6.907.800	1.716.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	Direktor at Sarana dan Prasara na

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikti	1	1	1	1	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 : PTN yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	126	129	132	135	138	6.901.800	1.710.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1						
	IKK 3.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana	-	-	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Dikti											
	IKK 3.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1						
	IKK 3.4 : Jumlah PTN yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	126	129	132	135	138						
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek							1.500	1.500	158.500	179.500	200.500	Direktorat Sarana dan Prasarana
	SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Iptek	-	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek	-	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 2 : Lembaga Litbang yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	-	-	15	17	19	-	-	157.000	178.000	199.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.4 : Jumlah lembaga Litbang yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	-	-	15	17	19						
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan							745.690	809.969	895.662	931.049	823.895	Direktor at

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Tinggi												Kualifik asi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1: Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Beasiswa SDM Dikti	12.036	12.035	13.132	12.845	12.767	742.690	805.969	891.662	927.049	819.895	
	IKK 2.1 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri	2459	2.459	1.667	1.155	1.240						
	IKK 2.2 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S3 Dalam Negeri	6366	6.366	8.205	8.447	8.265						
	IKK 2.3 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Luar Negeri	144	143	61	-	-						
	IKK 2.4 : Jumlah SDM	967	967	1.099	1.143	1.162						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Dikti penerima Beasiswa S3 Luar Negeri											
	IKK 2.5 : Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	2100	2.100	2.100	2.100	2.100						
	SK (Output) 3 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Dikti	-	1	1	1	1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti	-	1	1	1	1						
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang							364.430	315.546	256.791	216.676	156.385	Direktor at Kualifik asi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : Beasiswa SDM IPTEK	657	1.813	1830	1872	699	126.493	283.646	243.503	205.198	154.688	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.1 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Dalam Negeri	179	145	175	210	270						
	IKK 1.2 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Dalam Negeri	100	86	89	102	125						
	IKK 1.3 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Luar Negeri	28	80	151	125	73						
	IKK 1.4 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Luar Negeri	103	272	272	245	231						
	IKK 1.5 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	247	1.230	1.143	1.190	-						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek	2	2	2	2	2	237.937	31.900	13.288	11.478	1.697	
	IKK 2.1 : Jumlah	1	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Iptek											
	IKK 2.2 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset Pro)	1	1	1	1	1						
Program Penguatan Riset dan Pengembangan							1.540.041	1.485.761	1.730.127	2.947.877	3.486.775	Direktor at Jenderal Penguat an Riset dan Pengem bangan
	SP (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan											
	IKP 4.1 : Jumlah	5.008	6.229	12.000	14.000	19.000						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	publikasi internasional											
	IKP 4.2 : Jumlah KEKAYAAN INTELEKTUAL yang didaftarkan	1.580	1.735	1.910	2.200	2.400						
	IKP 4.3 : Jumlah prototipe R&D	530	632	783	1.000	1.200						
	IKP 4.4 : Jumlah prototipe industri	5	15	20	25	30						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Riset dan Pengembangan							17.334	34.524	29.479	94.677	94.415	Sekretar iat Direktor at Jenderal Penguat an Riset dan Pengem bangan
	SK (Output) 1 : Layanan	12	12	12	12	12	8.797	24.772	19.336	70.226	76.015	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Dukungan Manajemen Eselon I											
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	1	1	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen laporan keuangan dan perbendaharaan	1	1	1	1	1						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen LAKIP/LAKIN	1	1	1	1	1						
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	1	1	1	1	1						
	IKK 1.5 : Jumlah dokumen hokum	1	1	1	1	1						
	IKK 1.6 : Jumlah Dokumen Kerjasama	1	1	1	1	1						
	IKK 1.7 : Jumlah Dokumen Layanan Informasi	1	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.8 : Jumlah Dokumen Kepegawaian	1	1	1	1	1						
	IKK 1.9 : Jumlah Dokumen Rumah Tangga	1	1	1	1	1						
	IKK 1.10 : Jumlah Dokumen Barang Milik Negara	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )	12	12	12	12	12	199	1.413,32	739,93	3.250	3.400	
	IKK 2.1 : Jumlah perangkat pengolah data dan evaluasi	28	199	50	75	100						
	IKK 2.2 : Jumlah kendaraan	-	-	-	8	8						
	SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	8.338,67	8.338,67	8.338,67	18.200	15.000	
	IKK 3.1 : Gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12						
	IKK 3.2 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan	12	12	12	12	12						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	perkantoran											
	Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek						874	5.500	13.000	16.500	19.500	Direktor at Sistem Riset dan Pengem bangan
	SK (Output) 1 : Sistem Informasi Riset dan Pengembangan Iptek	1	1	1	1	1	-	1.500	1.000	1.000	1.000	
	IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Informasi Riset dan Pengembangan Iptek	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : <i>Technology Foresight</i>	1	1	2	1	1	-	3.000	2.000	2.500	3.000	
	IKK 2.1 : Jumlah <i>Technology Foresight</i>	1	1	2	1	1						
	SK (Output) 3 : Rekomendasi Kemitraan Riset dan	2	2	2	4	6	-	-	2.000	4.500	5.500	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan											
	IKK 3.1 : Jumlah rekomendasi kemitraan riset dan pengembangan	1	1	1	2	3						
	IKK 3.2 : Jumlah fasilitasi kemitraan Riset dan Pengembangan	1	1	1	2	3						
	SK (Output) 4 : Rekomendasi Kebijakan Implementasi RIRN dan Prioritas Riset Nasional	1	1	1	2	3	874	1.000	3.000	2.500	3.000	
	IKK 4.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan implementasi RIRN dan Prioritas Riset Nasional	1	1	1	2	3						
	SK (Output) 5 : Sistem Aplikasi Risbang Iptek dan Pendidikan Tinggi Pengembangan Iptek	-	-	3	4	4	-	-	5.000	6.000	7.000	
	IKK 5.1 : Jumlah pengembangan sistem	-	-	3	4	4						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	informasi SIMLINTABMAS-NG											
Kegiatan : Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat									80.000	96.000	110.000	Direktor at Riset dan Pengabd ian kepada Masyara kat
	SK (Output) 1: Paket Penelitian di Bidang Kesehatan dan Obat			15	18	21			17.000	20.400	26.000	
	IKK 1.1 : Jumlah Paket Penelitian di Bidang Kesehatan dan Obat			15	18	21						
	SK (Output) 2: Layanan Internal	2	2	2	2	2			60.000	60.600	66.000	
	IKK 2.1 : Jumlah Layanan Internal	2	2	2	2	2						
	SK (Output) 3: Layanan	12	12	12	12	12			13.000	15.000	18.000	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perkantoran											
	IKK 3.1 : Jumlah Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat							86.621	91.000	12.500	15.000	18.000	Direktor at Riset dan Pengabd ian kepada Masyara kat
	SK (Output) 1 : Hasil Penelitian untuk Pengabdian Masyarakat	250	250	-	-	-	81.000	81.000	-	-	-	
	IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian	250	250	-	-	-						
	SK (Output) 2 : Prototipe Teknologi untuk Masyarakat	12	34	40	60	80	5.621,05	10.000	12.500	15.000	18.000	
	IKK 2.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat	12	34	40	60	80						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat												Direktor at Riset dan Pengabd ian kepada Masyara kat
	SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BOPTN) PTN Non Badan Hukum	12.470	14.340	15.409	18.965	21.801	1.030.858	1.065.000	864.594	1.623.972	1.861.163	
	IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi	12.470	14.340	15.409	18.965	21.801						
	SK (Output) 2 : Bantuan Pendanaan Penelitian di PTN Badan Hukum	7	7	11	14	17	334.142	300.000	380.406	694.528	842.287	
	IKK 2.1 : Jumlah PTN BH menerima bantuan pendanaan penelitian	7	7	11	14	17						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 3 : Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (BOPTN) PTN Badan Hukum	-	-	-	1.000	1.500	-	-	-	70.000	100.000	
	IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	-	-	-	1.000	1.500						
	SK (Output) 4 : Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (BOPTN) PTN Non Badan Hukum	3.000	3.500	2.000	4.500	5.000	269.935	200.000	150.000	200.000	350.000	
	IKK 4.1 : Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	3.000	3.500	2.000	4.500	5.000						
Kegiatan : Pengembangan Teknologi Industri							14.433	35.500	142.000	164.500	187.000	Direktor at Pengem bangan Teknolo gi Industri

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 1 : Prototipe Hasil Pengembangan Teknologi di Industri	5	15	20	25	30	14.433,14	35.500	50.000	62.500	75.000	
	IKK 1.1 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang energi dan transportasi	-	-	5	7	8						
	IKK 1.2 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang pangan, kesehatan dan obat	-	-	5	7	8						
	IKK 1.3 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang hankam dan TIK	-	-	5	6	7						
	IKK 1.4 : Jumlah prototipe yang laik industri bidang bahan baku dan material maju	-	-	5	6	7						
	SK (Output) 2 : Hasil Penelitian untuk Pengabdian	-	-	235	250	250	-	-	92.000	102.000	112.000	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Masyarakat											
	IKK 2.1 : Jumlah hasil penelitian	-	-	235	250	250						
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian							5.369,42	9.000	15.599	31.400	37.500	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan di bidang valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual	-	-	1	1	1	-	-	300	500	500	
	IKK 1.1 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Sentra	17	20	20	25	29	2.436,24	3.000	2.700	5.000	5.500	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kekayaan Intelektual yang Dibina dan Diperkuat											
	IKK 2.1 : Jumlah sentra kekayaan intelektual yang dibina dan diperkuat	17	20	20	23	26						
	IKK 2.2 : Jumlah pelatihan TOT	-	-	1	2	3						
	SK (Output) 3 : Kekayaan Intelektual untuk Didanai dan Didaftarkan	20	20	40	46	52	644	1.500	1.200	2.500	3.000	
	IKK 3.1 : Jumlah non paten yang didaftarkan	-	-	20	23	26						
	IKK 3.2 : Jumlah paten yang dihasilkan	20	20	20	23	26						
	SK (Output) 4 : Rekomendasi Kebijakan Dibidang Perijinan Penelitian Asing dan Berisiko Tinggi dan Berbahaya	-	-	1	1	1	-	-	298,50	600	900	
	IKK 4.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perijinan	-	-	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya											
	SK (Output) 5 : Mitra Pendamping Peneliti Asing yang Difasilitasi	-	-	5	20	30	-	-	500	2.000	3.000	
	IKK 5.1 : Jumlah mitra pendamping peneliti asing yang difasilitasi	-	-	5	20	30						
	SK (Output) 6 : Aplikasi Riset Peneliti Asing yang Diproses	550	600	650	675	700	2.289,18	3.000	3.000	4.000	4.500	
	IKK 6.1 : Jumlah aplikasi riset peneliti asing	550	600	650	675	700						
	SK (Output) 7 : Teknologi yang Divaluasi	-	15	15	20	25	-	1.500	1.000	1.000	1.500	
	IKK 7.1 : Jumlah teknologi hasil litbang yang divaluaasi	-	15	15	20	25	-	1.500	1.000	1.000	1.500	
	SK (Output) 8 : Rekomendasi Kebijakan Dibidang Fasilitasi Jurnal Ilmiah	-	-	1	1	1	-	-	300	600	900	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 8.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang di bidang fasilitas jurnal ilmiah	-	-	1	1	1	-	-	300	600	900	
	SK (Output) 9 : Jurnal Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya	-	-	9	11	13		-	900	1.100	1.300	
	IKK 9.1 : Jumlah jurnal ilmiah nasional yang difasilitasi untuk diakreditasi	-	-	5	6	7	-	-	500	600	700	
	IKK 9.2 : Jumlah jurnal ilmiah nasional yang difasilitasi menjadi bereputasi internasional	-	-	4	5	6	-	-	400	500	600	
	SK (Output) 10 : Fasilitas Akses Basis Data Jurnal Ilmiah Internasional	-	-	16.000	20.000	24.000		-	4.500	5.000	5.000	
	IKK 10.1 : Jumlah basis data jurnal ilmiah internasional (non perguruan tinggi)	-	-	16.000	20.000	24.000	-	-	4.500	5.000	5.500	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 11 : Rekomendasi Kebijakan Dibidang Fasilitas Publikasi Ilmiah	-	-	1	1	1		-	300	600	900	
	IKK 11.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang fasilitas publikasi ilmiah	-	-	1	1	1	-	-	300	600	900	
	SK (Output) 12 : Artikel Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya	-	-	100	110	120		-	600	8.500	10.000	
	IKK 12.1 : Jumlah artikel ilmiah yang ditingkatkan mutunya untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi	-	-	50	55	60	-	-	300	1.400	1.540	
	IKK 12.2 : Jumlah artikel ilmiah yang ditingkatkan mutunya untuk dipublikasikan pada	-	-	50	55	60	-	-	300	6.800	7.480	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	jurnal ilmiah internasional bereputasi											
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi							28.452,51	51.947	44.000	67.100	88.410	Direktor at Pengelol aan Kekayaa n Intelekt ual
	SK (Output) 1 : KEKAYAAN INTELEKTUAL yang Didaftarkan dari Hasil Litbang Perguruan Tinggi	1.580	1.725	1.910	2.100	2.300	11.213,64	5.000	6.500	8.000	9.000	
	IKK 1.1 : Jumlah KEKAYAAN INTELEKTUAL yang didafar dari hasil Litbang perguruan tinggi	1.580	1.725	1.910	2.100	2.300						
	SK (Output) 2 : Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi yang			70	80	100			8.500	9.350	10.285	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Difasilitasi untuk Diakreditasi											
	IKK 2.1 : Jumlah jurnal ilmiah nasional dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk diakreditasi			45	50	60						
	IKK 2.2 : Jumlah jurnal ilmiah nasional dari perguruan tinggi yang difasilitasi menjadi bereputasi internasional			25	30	40						
	SK (Output) 3 : Fasilitasi Akses Basis Data Jurnal Ilmiah Internasional	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	10.000	12.794	12.500	13.750	15.125	
	IKK 3.1 : Jumlah basis data jurnal ilmiah internasional untuk perguruan tinggi	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000						
	SK (Output) 4 : Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang	1.500	1.500	2.100	4.200	6.300	17.238,87	17.342	18.000	19.800	21.780	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Difasilitasi untuk Dipublikasikan											
	IKK 4.1 : Jumlah artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi	500	500	600	1.200	1.800						
	IKK 4.2 : Jumlah artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi	1.000	1.000	1.500	3.000	4.500						
Program Penguatan Inovasi							171.548	190.609	372.234,6	927.698,3	927.698,3	Direktor at Jenderal Penguat an Inovasi
	SP (Outcome) 5: Menguatnya											

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kapasitas inovasi											
	IKP 5.1 : Jumlah produk inovasi	10	15	40	50	60						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi									22.234,6	27.698,3	27.698,3	Sekretar iat Direktor at Jenderal Penguat an Inovasi
	SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	-	6	6	6	-	-	14.072,6	18.198,3	18.198,3	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen RKA	-	-	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah laporan kinerja	-	-	1	1	1						
	IKK 1.3 : Jumlah layanan dukungan manajemen	-	-	4	4	4						
	SK (Output) 2 : Layanan	-	-	1	1	1	-	-	2.162	1.000	1.000	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Internal ( <i>Overhead</i> )											
	IKK 2.1 : Jumlah layanan internal	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12	-	-	6.000	8.500	8.500	
	IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran	-	-	12	12	12						
Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi							-	5.200	16.500	50.000	50.000	Direktor at Sistem Inovasi
	SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi	-	4	5	12	5	-	5.200	9.500	40.000	40.000	
	IKK 1.1 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan penguatan inovasi	-	1	1	2	1						
	IKK 1.2 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan integrasi sistem informasi inovasi nasional	-	1	1	2	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.3 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan penguatan kemitraan strategis dan wahana inovasi	-	1	1	2	1						
	IKK 1.4 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan diseminasi ( <i>outreach</i> ) hasil produk inovasi	-	1	1	2	1						
	IKK 1.5 : Jumlah kebijakan teknis penguatan inovasi	-	-	1	2	1						
	SK (Output) 2 : Klaster Inovasi	-	-	7	10	10	-	-	7.000	9.000	11.000	
	IKK 2.1 : jumlah kabupaten/kota yang menjadi daerah regionalisasi inovasi	-	-	7	10	10						
Kegiatan : Pengembangan dan pengelolaan Pusat Peragaan Iptek							-	16.825,1	21.000	72.301,7	72.301,7	Direktor at

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												Sistem Inovasi
	SK (Output) 1: Paket Promosi Iptek	-	12	12	12	12			9.751,8	9.801,7	22.301,7	
	IKK 1.1 : Jumlah Paket Promosi Iptek	-	12	12	12	12						
	SK (Output) 2: Layanan Internal (Overhead)	-	1	1	1	1			2.248,2	2.500	5.000	
	IKK 2.1 : Jumlah Layanan Internal (Overhead)	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 :Layanan Perkantoran	-	12	12	12	12			9.000	10.000	15.000	
	IKK 3.1 : Jumlah Layanan Perkantoran	-	12	12	12	12						
	SK (Output) 4 : Gedung/Bangunan	-	-	1	1	1				50.000	30.000	
	IKK 4.1 : Jumlah Gedung/bangunan yang direnovasi/dibangun	-	-	1	1	1						
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis							-	18.500	105.000	210.000	210.000	Direktorat



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Teknologi													Perusah aan Pemula Berbasis Teknolo gi
	SK (Output) 1 Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	-	25	45	50	55	-	18.500	55.000	110.000	110.000		
	IKK 1.1 : Jumlah kebijakan teknis tatakelola dan tatalaksana bagi inkubator	-	-	1	1	1							
	IKK 1.2 : Jumlah kebijakan teknis tatakelola dan tatalaksana bagi PPBT	-	-	1	1	1							
	IKK 1.3 : Jumlah produk inovasi yang dihasilkan	-	-	45	50	55							

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	PPBT											
	IKK 1.4 : Jumlah kerjasama antar PPBT dan antara PPBT dengan industri/pelaku usaha besar	-	-	1	1	1						
	IKK 1.5 : Jumlah PPBT binaan yang berhasil mandiri	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	-	-	35	40	45	-	-	50.000	100.000	100.000	
	IKK 2.1 : Jumlah kebijakan teknis penguatan inovasi PPBT dari perguruan tinggi	-	-	1	1	1						
	IKK 2.2 : Jumlah produk inovasi yang dihasilkan PPBT dari perguruan tinggi	-	-	35	40	45						
	IKK 2.3 : Jumlah PPBT	-	-	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dari perguruan tinggi yang menjadi mandiri											
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi								30.000	55.000	140.000	140.000	Direktor at Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
	SK (Output) 1 : Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	-	50	70	75	85	-	30.000	55.000	140.000	140.000	
	IKK 1.1 : Jumlah kebijakan teknis pembinaan Calon PPBT	-	-	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	-	-	70	75	85						
	IKK 1.3 : Jumlah	-	-	35	40	45						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kandidat CPPBT yang berhasil menjadi PPBT											
Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri							-	36.000	75.000	100.000	100.000	Direktor at Inovasi Industri
	SK (Output) 1 : Produk Inovasi Litbang di Industri	-	35	45	100	100	-	36.000	75.000	100.000	100.000	
	IKK 1.1 : Jumlah kebijakan/bauran kebijakan teknis inovasi Litbang di industri	-	-	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah produk inovasi Litbang di industri	-	-	45	100	100						
	IKK 1.3 : <i>Indonesia Innovation Forum</i>	-	-	1	1	1						
Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri							-	70.000	100.000	200.000	200.000	Direktor at Inovasi Industri
	SK (Output) 1 : Produk	-	5	11	25	25	-	70.000	100.000	200.000	200.000	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Inovasi Perguruan Tinggi di Industri											
	IKK 1.1 : Jumlah kebijakan /bauran kebijakan teknis inovasi perguruan tinggi di industri	-	-	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah produk inovasi perguruan tinggi di industri	-	-	11	25	25						
	IKK 1.3 : Jumlah model/percontohan transfer <i>technology office</i>	-	-	1	1	1						
	IKK 1.4 : Jumlah model/percontohan <i>teaching industry/ teaching factory</i>	-	-	1	1	1						
	IKK 1.5 : Jumlah klaster inovasi	-	-	1	2	3						
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas							2.310	43.589	55.581	63.918	73.506	Inspekto rat

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi												Jenderal
	SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti											
	IKP 6.1 : Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material	40	50	60	70	80						
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti							1.157,60	24.765,48	37.148,22	55.722,33	83.583,49	Sekretar iat Inspekto rat Jenderal
	SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	43	43	43	43	43	812,04	10.787,88	16.181,82	24.272,73	36.409,10	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan dukungan manajemen eselon 1	43	43	43	43	43						
	SK (Output) 2 : Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )	4	4	4	4	4	50	8.382,51	12.573,77	18.860,65	28.290,98	
	IKK 2.1 : Jumlah layanan internal ( <i>Overhead</i> )	550	650	675	700	725						
	IKK 2.2 : Renovasi Gedung	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822						
	SK (Output) 3 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	295,56	5.595,09	8.392,63	12.588,94	18.883,41	
	IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I							384,02	8.245,67	12.368,50	18.552,75	27.829,13	Inspekto rat I
	SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah I	100	100	100	100	100	384,02	8.245,67	12.368,50	18.552,75	27.829,13	
	IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern	100	100	100	100	100						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	wilayah I											
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II							384,01	8.839,19	13.258,78	19.888,17	29.832,26	Inspekto rat II
	SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah II	100	100	100	100	100	384,01	8.839,19	13.258,78	19.888,17	29.832,26	
	IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah II	100	100	100	100	100						
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III							384,01	8.624,66	12.937,00	19.405,49	29.108,24	Inspekto rat III
	SK (Output) 1 : Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah III	100	100	100	100	100	384,01	8.624,66	12.937,00	19.405,49	29.108,24	
	IKK 1.1 : Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah III	100	100	100	100	100						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis							25.039,413	28.516.365	28.173.564	32.399.598	35.639.558	Sekretar iat



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi											Jenderal
	SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti											
	IKP 7.1 : Hasil Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	-	-	82%	84%	86%						
	IKP 7.2 : Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	IKP 7.3 : Penilaian terhadap AKIP	B	B	BB	BB	A						
	IKP 7.4 : Indeks Kepuasan Pelayanan	60%	65%	Hijau	Hijau	Hijau						
	IKP 7.5 : Prosentase kasus hukum yang	40%	45%	50%	55%	60%						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	diselesaikan											
	IKP 7.6: Tingkat kesesuaian kompetensi Pejabat	-	75%	80%	95%	100%						
	IKP 7.7 : Rasio data dan knowledge Iptek dan Dikti yang dimanfaatkan	-	100%	100%	100%	100%						
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja						11.958	18.500	15.677	18.747	21.559	Biro Perenca naan
	SK (Output) 1 : Dokumen Layanan Perencanaan	4	4	4	4	4	11.958	10.000	7.177	8.972	10.318	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan Anggaran	3	3	3	3	3						
	IKK 1.2 : Dokumen penyusunan standar satuan biaya pendidikan tinggi	1	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 2 : Dokumen Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3	3	3	3	-	4.500	4.500	5.175	5.951	
	IKK 2.1 : Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran		3	3	3	3						
	IKK 2.2 : Layanan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran		3	12	12	12						
	IKK 2.3 : Tingkat kepatuhan penyampaian data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi ke stakeholder terkait		100	100	100	100						
	SK (Output) 3 : Dokumen Layanan Akuntabilitas dan Pelaporan	4	4	4	4	4	-	4.000	4.000	4.600	5.290	
	IKK 3.1 : Jumlah layanan akuntabilitas dan	2	2	2	2	2						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pelaporan											
	IKK 3.2 : Jumlah dokumen lakin eselon 1 dan kementerian	2	2	2	2	2						
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								23.499,10	32.678,55	56.000	60.000	Biro Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : Dokumen Layanan Manajemen SDM	-	4	4	4	4	-	23.499,10	32.678,55	56.000	60.000	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan perencanaan dan pengembangan	-	3	3	3	3						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan mutasi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, disiplin, dan pemberhentian	-	3	3	3	3						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan mutasi	-	3	3	3	3						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	jabatan fungsional											
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen layanan sistem informasi dan kinerja	-	3	3	3	3						
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum							-	-	67.045,29	70.397,55	73.917,43	Biro Keuanga n dan Umum
	SK (Output) 1 : Layanan Manajemen BMN	-	-	12	12	12	-	-	5.929,15	6.225,61	6.536,89	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan pengelolaan BMN	-	-	12	12	12						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan pelaporan keuangan BMN	-	-	2	2	2						
	SK (Output) 2 : Layanan Protokol			12	12	12	-	-	10.000	10.500	11.025	
	IKK 2.1 : Jumlah layanan keprotokol			12	12	12						
	SK (Output) 3 : Layanan Umum	-	-	2	2	2	-	-	6.978,92	7.327,87	7.694,26	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen layanan kepegawaian dan ketatalaksanaan	-	-	1	1	1						
	IKK 3.2 : Jumlah dokumen layanan persuratan dan kearsipan	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 4 : Layanan Perkantoran	-	12	12	12	12	-	39.723	44.137,22	46.344,08	48.661,29	
	IKK 4.1 : Gaji dan tunjangan	-	12	12	12	12						
	IKK 4.2 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	12	12	12	12						
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan							-	-	25.884,71	28.473,19	31.320,50	Biro Keuangan dan Urmum
	SK (Output) 1 : Layanan Manajemen Keuangan	-	-	32	36	40	-	-	25.884,71	28.473,19	31.320,50	

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan perbendaharaan	-	-	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan laporan keuangan	-	-	2	2	2						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan PTN PKBLU dan PNPB	-	-	28	32	36						
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen kerugian negara	-	-	1	1	1			2.771,54	3.048,69	3.353,56	
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi							-	-	40.862,92	44.949,21	49.444,13	Biro Hukum dan Organisasi
	SK (Output) 1 : Layanan Hukum	-	-	2	2	2	-	-	21.118,62	23.230,48	25.553,53	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan	-	-	50	40	35						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.2 : Jumlah layanan advokasi hukum	-	-	12	12	15						
	SK (Output) 2 : Layanan Manajemen Organisasi	-	-	23	29	33	-	-	15.941,60	17.535,76	19.289,34	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen layanan kelembagaan	-	-	8	9	8						
	IKK 2.2 : Jumlah layanan ketatalaksanaan	-	-	15	20	25						
	SK (Output) 3 : Layanan Reformasi Birokrasi	-	-	3	2	2	-	-	3.802,69	4.182,96	4.601,26	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen layanan reformasi birokrasi	-	-	3	2	2						
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik							-	-	27.872,58	29.266,21	30.729,52	Biro Kerjasa ma dan Komuni kasi Publik
	SK (Output) 1 : Dokumen	3	3	3	3	3	-	-	21.691,03	22.775,58	23.914,36	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik											
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen layanan kerjasama dalam negeri	1	1	1	1	1						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen layanan publikasi dan dokumentasi	1	1	1	1	1						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan komunikasi publik	1	1	1	1	1						
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen sistem informasi kerjasama	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Dokumen Layanan Kerjasama Internasional	1	1	1	1	1	-	-	6.181,56	6.490,63	6.815,17	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen layanan	1	1	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kerjasama internasional											
	Kegiatan : Dukungan Manajemen PTN/Kopertis						-	-	2.133.568	2.453.603	2.821.644	
	SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran			12	12	12	-	-	2.133.568	2.453.603	2.821.644	
	Kegiatan : Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi						-	-	2.115.109	2.432.376	2.797.232	
	SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)			12	12	12	-	-	284.782	327.500	376.625	
	SK (Output) 2 : Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN-BH)			11	11	11	-	-	1.830.327	2.104.876	2.420.607	
	Kegiatan : Pengelolaan Urusan Perbendaharaan						-	90.000	96.185	98.589	101.054	
	SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran		12	12	12	12	-	90.000	96.185	98.589	101.054	
	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						77.434	82.911	90.000	92.250	94.556	Pusat Peneliti an Ilmu Pengeta

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
												huan dan Teknolo gi
	SK (Output) 1 : Layanan Internal	-	3	3	3	3	-	1.000	2.804,26	2.509,69	2.760,66	
	IKK 1.1 : Layanan kepegawaian dan hukum	-	1	1	1	1						
	IKK 1.2 : Layanan keuangan dan perlengkapan	-	1	1	1	1						
	IKK 1.3 : Layanan perencanaan, protokol dan humas	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Layanan Kerjasama	-	15	20	25	30	-	2.000,00	1.350,32	1.485,36	1.633,89	
	IKK 2.1 : Jumlah kerjasama Puspiptek dengan pihak ketiga	-	15	20	25	30						
	IKK 2.2 : <i>Updating</i> basis data potensi kawasan	-	-	1	1	1						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Puspiptek											
	SK (Output) 3 : Layanan Bisnis Teknologi	-	20	15			-	5.555,63	1.765,87	1.942,46	1.942,46	
	IKK 3.1 : Jumlah tenan yang diinkubasi	-	20	20	20	20						
	SK (Output) 4 : Layanan Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	3	3	3	3	46.000	27.888,38	22.079,55	75.802,17	45.126,53	
	IKK 4.1 : Sarana dan prasarana kawasan yang terkelola dengan baik	3	2	1	1	1						
	IKK 4.2 : Sarana dan prasarana kawasan yang telah direvitalisasi	2	1	1	1	1						
	IKK 4.3 : Layanan keamanan dan keselamatan	-	-	1	1	1						
	SK (Output) 5 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	31.433,63	46.466,70	62.000	56.224,71	61.847,18	
	IKK 5.1 : Penyelenggaraan	12	12	12	12	12						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	operasional dan pemeliharaan perkantoran											
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti							-	-	43.951,03	65.000	73.500	Pusat Data dan Informa si Iptek dan Dikti
	SK (Output) 1 : Layanan Data dan Informasi	-	3	3	3	3			37.068,42	57.000	63.500	
	IKK 1.1 : Jumlah <i>draft</i> kebijakan standar pengelolaan data, informasi, dan NSPK TIK Iptek Dikti.	-	8	10	11	14						
	IKK 1.2 : Tersedianya informasi geospasial tematik untuk pengembangan Iptek Dikti	-	2	5	11	16						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	berbasis kewilayahan yang dihasilkan											
	IKK 1.3 : Rasio data dan informasi yang tidak sesuai <i>quality standard</i>	-	10%	9%	8%	7%						
	IKK 1.4 : Jumlah laporan indikator Iptek	-	1	1	1	1						
	IKK 1.5 : Rasio kelengkapan data pendidikan tinggi terhadap standar nasional pendidikan tinggi	-	60%	75%	85%	100%						
	IKK 1.6 : Jumlah jaringan pengelola data, informasi dan TIK Iptek Dikti yang terbangun dan aktif.	-	22	23	24	25						
	IKK 1.7 : Rasio program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi yang memanfaatkan TIK	-	24%	73%	94%	100%						

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	terhadap total program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi Kemenristekdikti											
	IKK 1.8 : Service Level Index (SLI) Layanan Pusdatin Iptek dan Dikti	-	70%	80%	85%	90%						
	SK (Output) 2 : Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12	-	-	6.882,61	8.000	10.000	
	IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran	-	-	12	12	-						
	SK (Output) 3 : Layanan Internal	-	-	3	3	3	-	-	6.882,61	8.000	10.000	
	IKK 3.1 : Dukungan pelaksanaan tugas fungsi tata usaha	-	-	3	3	3						
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan							-	47.680,5	44.000	54.247	61.602	Pusat Pendidik an dan Pelatih an

Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SK (Output) 1 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	3	3	3	3	-	39.647,5	28.406	35.615	42.735	
	IKK 1.1 : Jumlah pegawai peserta diklat struktural	-	320	300	200	200						
	IKK 1.2 : Jumlah pegawai peserta diklat prajabatan	-	3.500	3.500	3.000	3.000						
	IKK 1.3 : Jumlah pegawai peserta diklat teknis	-	450	500	750	850						
	SK (Output) 2 : Layanan Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	-	3	6	6	6	-	2.621	2..779	3.500	3.850	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen program dan evaluasi diklat	-	2	2	2	2						
	IKK 2.2 : Jumlah dokumen kerjasama diklat	-	1	1	1	1						
	IKK 2.3 : Jumlah dokumen penjaminan mutu	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 : Layanan	-	-	3	3	3	-	-	2.002,06	3.300	3.630	



Pro gra m/ Keg iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa naan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Internal											
	IKK 3.1 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi tata usaha	-	-	3	3	3						
	SK (Output) 4 : Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12	-	-	5.786,54	12.491,41	13.740,55	
	IKK 4.1 : Layanan operasional perkantoran	-	-	12	12	12						
	IKK 4.2 : Sarana dan prasarana perkantoran	-	-	10	10	10						

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MOHAMAD NASIR

Telah diperiksa dan disetujui:

Kepala Biro Perencanaan		Kepala Biro Hukum dan Organisasi		Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

MATRIK KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis	Undang-Undang	Biro Hukum dan Organisasi	- DPR - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					<div>Keuangan</div> <div><div>- Kementerian PAN dan RB</div><div>- Kementerian Koordinator PMK</div><div>- Kementerian ESDM</div><div>- Kementerian Pertanian</div><div>- Kementerian Kesehatan</div><div>- Kementerian PPN/Bappenas</div><div>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</div><div>- Kementerian Komunikasi dan Informatika</div><div>- Kementerian</div></div>	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					Kelautan dan Perikanan - Badan Kepegawaian Negara - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Badan Tenaga Nuklir Nasional - Lembaga Perencanaan dan Antarksa Nasional - Badan Standardisasi Nasional - Badan Pengawas Tenaga Nuklir	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					- Badan Informasi Geospasial	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	Penyempurnaan Undang-Undang Ketenaganukliran sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis	Undang-Undang	Biro Hukum dan Organisasi/ BAPETEN	- DPR - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian ESDM - Kementerian Kesehatan - Kementerian Perhubungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BAPETEN - BATAN	2018
3.	Peraturan Pelaksanaan dari Rancangan Undang-Undang	Implementasi amanat Rancangan Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi	- Sekretariat Negara - Kementerian Hukum	2018-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			dan HAM - LIPI - BPPT	
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sains dan Teknologi	Dibutuhkannya sinergitas program dan penganggaran kegiatan P3 Iptek	Perpres	Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti	- Kementerian Perindustrian - Kementerian Pertanian - Kementerian Kelautan dan Perikanan - LIPI - BPPT - BATAN	2017
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang	Memberikan <i>landscape</i> Perguruan Tinggi	Peraturan Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal	- Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Kesehatan	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pendidikan Kedokteran			Pembelajaran dan Kemahasiswaan	<div><div>- Setneg</div><div>- Kementerian Dalam Negeri</div><div>- Kementerian Keuangan</div></div>	
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	Memberikan landasan dalam meningkatkan peran insinyur	Peraturan Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti	<div><div>- Kementerian Hukum dan HAM</div><div>- Setneg</div><div>- Kementerian PUPERA</div><div>- Kementerian Keuangan</div><div>- Kementerian Ketenagakerjaan</div><div>- Kementerian PAN dan RB</div><div>- Kementerian ESDM</div><div>- Kementerian Perhubungan</div></div>	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					<div><div>- Kementerian Perindustrian</div><div>- PII</div></div>	
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	<div><div>- Implementasi amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</div><div>- Menjadi landasan hukum tata cara tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</div></div>	Peraturan Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti	<div><div>- Kementerian Hukum dan HAM</div><div>- Setneg</div><div>- Kementerian Dalam Negeri</div><div>- Kementerian Keuangan</div><div>- Kementerian Kesehatan</div><div>- Kementerian PAN dan RB</div><div>- Kementerian Pariwisata</div><div>- Kementerian Perhubungan</div><div>- Kementerian</div></div>	2017



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					Perindustrian - Kementerian Kominfo - BMKG	
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penugasan Dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi amanat Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>- Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam penugasan dosen yang diangkat oleh pemerintah untuk ditugaskan pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia</li></ul>	Peraturan Pemerintah	Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Hukum dan HAM	2018
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Riset	Menjadi acuan dalam pembangunan Iptek 2015-	Perpres	Biro Hukum dan Organisasi	- Kementerian Hukum dan HAM	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Nasional Tahun 2017-2045	2019			<ul style="list-style-type: none"><li>- BAPPENAS</li><li>- Kemenko PMK</li><li>- LIP1</li><li>- BPPT</li><li>- BATAN</li><li>- BAPETEN</li><li>- LAPAN</li><li>- BSN</li><li>- Kemenko Maritim</li><li>- Kemenkes</li><li>- Kementan</li></ul>	
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan dalam Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan	Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	Peraturan Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi/ LAPAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum dan HAM</li><li>- LAPAN</li><li>- Kementerian Sekretariat Negara</li><li>- Kementerian Kominfo</li></ul>	2017
11.	Rancangan Peraturan	Memberikan landasan untuk	Peraturan	Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum</li></ul>	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pemerintah tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Pengelolaan Mineral Radioaktif	pengaturan perizinan bahan galian nuklir dan pengelolaan mineral radioaktif dan mineral ikutan radioaktif dari pertambangan mineral dan batu bara	Pemerintah	dan Organisasi/ BAPETEN	dan HAM - Kementerian ESDM - BAPETEN - BATAN	
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Insinyur Indonesia	Memberikan landasan tentang Dewan Insinyur Indonesia	Peraturan Presiden	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Hukum dan HAM	2017
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	Memberikan landasan untuk menjalankan atau memberikan hak bagi Ketua, Wakil, dan Anggota MPTN	Peraturan Presiden	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Hukum dan HAM	2017
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Mikroorganisme	Memberikan landasan untuk pengaturan ruang lingkup dan prosedur pengelolaan mikroorganisme secara nasional	Peraturan Presiden	Biro Hukum dan Organisasi/LIPI	- Kementerian Hukum dan HAM - LIPI - Kementerian Lingkungan Hidup	2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi	Memberikan landasan untuk pengaturan penetapan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi serta rincian kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi	Peraturan Presiden	Biro Hukum dan Organisasi/ BAPETEN	dan Kehutanan - Kementerian Hukum dan HAM - BAPETEN - BATAN	2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Telah diperiksa dan disetujui:

Kepala Biro Perencanaan		Kepala Biro Hukum dan Organisasi		Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	